

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA ANGGARAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi**

OLEH :

FITRA SILFIA
NPM : 1802110047



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 08 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

FITRA SILFIA
NPM : 1802110047

Dengan judul:

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA ANGGARAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR**

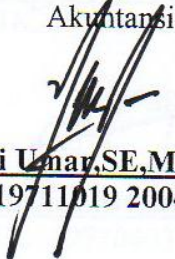
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

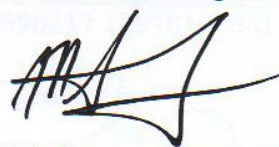
Ketua Program Studi
Akuntansi

Pembimbing I

Pembimbing II


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001


Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19590217 199101 1 001


M. Fahriansyah, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19770403 200604 1 001



Mengetahui,
Dekan,


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 08 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

FITRA SILFIA
NPM : 1802110047

Dengan judul:

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA ANGGARAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 04 Maret 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak, CA
NIK. 19590217 199101 1 001

Anggota

M. Fahriansyah, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19770403 200604 1 001

Anggota

Rusnaldi, S.E., M.Si
NIK. 19790615 200507 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen

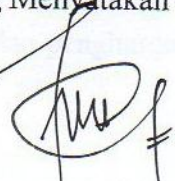
Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 08 Maret 2022
Yang Menyatakan




FITRA SILFIA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **FITRA SILFIA**
NPM : 1802110047
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif** (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 08 Maret 2022

Banda Aceh, 08 Maret 2022

Yang Menyatakan,



FITRA SILFIA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak Selaku ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

4. Bapak Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak. CA Selaku pembimbing pertama
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
5. Bapak M. Fahriansyah, SE, M.Si, CA Selaku pembimbing kedua Fakultas
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf
Pengajar pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu
pengetahuan kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan
semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	7
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	 9
2.1 Landasan Teoritis	9
2.1.1 Kinerja Anggaran	9
2.1.2 Akuntabilitas	11
2.1.3 Transparansi	13
2.1.4 Partisipasi Masyarakat	16
2.2. Penelitian Sebelumnya	20
2.3. Kerangka Penelitian	24
2.3.1 Hubungan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Anggaran.	24
2.3.2 Hubungan Transparansi Publik terhadap Kinerja Anggaran	25
2.3.3 Hubungan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Anggaran	26
2.4. Hipotesis	28
 BAB III METODE PENELITIAN	 31
3.1. Desain Penelitian	31
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian.....	33
3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	35
3.4. Definisi dan Operasioanalisis Variabel.....	36
3.5. Teknik Analisis Data	37
3.6. Pengujian Data	39
3.6.1. Uji Reliabilitas	39
3.6.2. Uji Validitas	39
3.6.3. Uji Asumsi Klasik	40
3.7. Rancangan Pengujian Hipotesis	41
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 43
4.1. Gambaran Umum Badan Pembangunan Daerah Aceh	43
4.2. Karakteristik Responden	44
4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	46
4.4. Analisis Deskriptif	48

3.5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda	58
3.6. Pembahasan.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
4.1. Desain Penelitian.....	67
4.2. Populasi dan Sampel Penelitian	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Matrik Penelitian Sebelumnya	24
Tabel 3.1 Jumlah SKPD Kabupaten Aceh Besar	34
Tabel 3.2 Definisi Operasional	36
Tabel 3.3 Skala Likert	38
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	44
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas	47
Tabel 4.3 Uji Reliabilitas variabel penelitian (Alpha)	48
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	50
Tabel 4.5 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kinerja Anggaran	52
Tabel 4.6 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas	54
Tabel 4.7 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Transparansi	55
Tabel 4.8 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Partisipasi Masyarakat	57
Tabel 4.9 Pengaruh variabel bebas terhadap Kinerja Anggaran	58
Tabel 4.10 Model Summury	60
Tabel 4.11 Annova	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Matrik Penelitian Sebelumnya	29
Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas	51
Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas	49

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA ANGGARAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
DAERAH ACEH**

**FITRA SILFIA
NPM : 1802110047**

Pembimbing I : Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak. CA

Pembimbing II : M. Fahriansyah, SE, M.Si

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Data penelitian dikumpulkan melalui daftar pertanyaan/kuisisioner dan studi dokumentasi. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji bersama-sama dan uji parsial dimaksud untuk mengetahui secara bersama-sama dan secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Objek penelitian ini adalah tentang Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Ukuran sampel penelitian ini sebanyak 74 pegawai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara uji simultan antara variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Kemudian secara parsial yaitu Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Kata kunci: *Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh dan Kinerja Anggaran*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia menganut asas desentralisasi yang memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui Otonomi Daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan asas-asas pelayanan publik yang didalamnya meliputi : transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewajiban.

Pemerintah daerah telah menetapkan tujuan organisasinya dalam berbagai dokumen perencanaan. Rencana strategis yang telah disusun haruslah didukung oleh anggaran yang memadai agar semua program yang telah direncanakan dapat tercapai. Keterbatasan sumber daya (dana) menjadi kendala yang utama dimana ketersediaan pendanaan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan tidak dapat diperoleh dengan mudah. Maka langkah pemerintah selanjutnya adalah dengan membuat prioritas program dengan tetap mengacu kepada prioritas nasional.

Sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tuntutan masyarakat akan diterapkannya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini wajib diterapkan karena adanya perubahan desentralisasi pengelolaan pemerintahan daerah. *Good Corporate Governance* adalah syarat utama bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mewujudkan harapan masyarakat dan tercapainya tujuan organisasi.

Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja suatu organisasi sangat penting, guna evaluasi dan perencanaan masa depan (Safitri, 2016). Pada organisasi sektor publik, anggaran dapat digunakan untuk menilai kinerja para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga anggaran mampu mempengaruhi perilaku dan kinerja aparat pemerintah daerah. proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan kompleks, adanya kemungkinan akan menimbulkan dampak fungsional dan disfungsional terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi.

Kinerja anggaran sejak tahap penyusunan, pembahasan hingga pengesahan APBD dan laporan keterangan atas pertanggungjawaban, difokuskan umumnya pada besaran biaya yang dianggarkan, atau dengan kata lain semata-mata jumlah anggaran yang mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Terserapnya anggaran lebih diprioritaskan daripada menghemat anggaran, sehingga pertimbangannya tidak melenceng dari target atau tujuan kinerja.

Akuntabilitas menurut Kusumastuti (2018:2) adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya. Akuntabilitas merupakan tindakan

pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan secara berkala pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan potensi sumber daya yang dipercayakan pada suatu organisasi (PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah).

Akuntabilitas merupakan kunci sukses bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar pada pelaksanaan kebijakan sistem penganggaran sehingga mampu mempertahankan kepercayaan publik. Berdasarkan permasalahan yang terjadi bahwa penerapan akuntabilitas yang tidak tepat maka berdampak pada kinerja aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Salah satu SKPK yang akuntabilitas kinerja rendah atau tidak mencapai target hingga 100 % yaitu pada Dinas Kominfo Aceh Besar pada tahun 2018 dengan indikator “terselesai pengaduan masyarakat” hanya capaian kinerja 66%. Kemudian SKPD selanjutnya yaitu Inspektora Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2018 dengan indikator “jumlah penanganan kasus pada wilayahnya” yaitu hanya mampu capaian kinerja sebesar 47%. Sehingga hal ini menjadi salah satu permasalahan dalam penelitian ini (Sumber: Laporan Keuangan Dinas Kominfo Aceh Besar dan Inspektora Kabupaten Aceh Besar 2018).

Capaian kinerja yang tidak mencapai 100% disebabkan beberapa faktor di antaranya masih kurangnya tenaga pengawasan fungsional, masih kurangnya aparatur pengawasan yang berlatar belakang sarjana ekonomi jurusan akuntansi dan ilmu teknis tertentu, terbatasnya anggaran pelaksanaan diklat, baik diklat teknik maupun diklat fungsional, kemudian terdapat aparatur pengawasan yang tidak disiplin dan kurang keseriusan auditi dalam menindaklanjuti hasil temuan pengawasan.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, “Transparansi berarti wujud pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat luas

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengakses secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah berupa laporan tanpa ada yang dirahasiakan dari publik dalam setiap proses pengelolaan keuangan yang dapat dipercayakan kepada organisasi dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pengertian transparansi menurut Mardiasmo (2018:20) adalah salah satu cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam pemerintahan, termasuk diantaranya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah serta implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil survey awal dengan petugas tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar bahwa kurangnya pengawasan keuangan daerah yang dilakukan DPR Aceh akan berdampak transparansi yang dilakukan oleh aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Salah satu dampak yang terjadi mengenai transparansi yaitu tingkat kecurangan dalam pelaporan keuangan atau keterlambatan pelaporan keuangan. Kemudian kurang pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPK Provinsi Aceh terhadap SKPK Kabupaten Aceh Besar menjadi salah faktor yang dapat meningkatkan kecurangan oleh pihak aparatur dan pengelolaan keuangan di masa krisis (pengelolaan keuangan di akhir waktu dengan waktu terbatas) cenderung memperbesar risiko terjadinya *fraud* (kecurangan). Untuk itu, peran pendeteksian dapat dilakukan melalui pemeriksaan yang dilakukan BPK sangat penting pada setiap tahun, dimana seluruh pemeriksaan didesain dan dilaksanakan untuk dapat mendeteksi *fraud* yang relevan dengan tujuan pemeriksaan.

Hal ini perlu dilakukan agar aparaturnya Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar dapat membuat laporan keuangan dan kinerja anggaran dengan transparansi.

Partisipasi masyarakat merupakan proses untuk melibatkan bawahan, baik secara perorangan atau kelompok yang secara langsung di dalamnya dan mempunyai pengaruh dalam penyusunan, dan pelaksanaan, dan kinerjanya akan dinilai berdasarkan pencapaian anggaran. Partisipasi anggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Partisipasi banyak menguntungkan bagi suatu organisasi, hal ini dapat dijumpai pada penelitian-penelitian yang dilakukan pada organisasi komersial maupun sektor publik.

Pengertian partisipasi masyarakat menurut Supomo dan Indriantoro (2018:17) adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Namun faktanya yang terjadi bahwa kurangnya partisipasi atau dukungan masyarakat pada kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Kemudian pihak aparaturnya kurang melibatkan masyarakat dalam berbagai pembangunan, padahal masyarakat sudah terlihat partisipasinya tetapi masih kurang maksimal karena masyarakat kurang peduli terhadap kemajuan pembangunan dikarenakan aparaturnya yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Saat ini partisipasi masyarakat dalam memberi masukan atau pengawasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar sangat penting agar anggaran dapat dikelola dengan akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya partisipasi masyarakat sebagai wujud nyata keterlibatan masyarakat dari suatu proses mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi keuangan daerah merupakan

pemberdayaan masyarakat yang berarti pula sebagai suatu proses pembangunan dan masyarakat sebagai upaya dari pemerintah menaruh kepercayaan untuk membangun dirinya dan daerahnya sendiri sesuai kemampuan yang ada padanya.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis mengambil judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
2. Apakah akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Apakah transparansi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Apakah partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk menguji secara parsial pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk menguji secara parsial pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Untuk menguji secara parsial pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawasan kepada penulis mengenai akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kinerja anggaran SKPD
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau pun sebagai data pembanding sesuai dengan bidang yang akan diteliti.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada aparatur SKPD Kabupaten Aceh Besar

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas serta rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini dibatasi dengan

ruang lingkup penelitian tentang akuntabilitas publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Kinerja Anggaran

2.1.1.1 Pengertian Kinerja Anggaran

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, baik secara kuantitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Moeheriono, 2018:23). Kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasi untuk melaksanakan pekerjaan sehingga dengan jelas *output* yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Kinerja anggaran akan menunjuk pada efektivitas kerja pegawai, dimana hal ini akan menyangkut pengharapan untuk mencapai hasil yang terbaik sesuai dengan tujuan kebijakan (Syahrani, 2018:3).

Kinerja adalah perilaku yang menunjukkan kompetensi yang relevan dengan tugas-tugas yang realitis dan gambaran perilaku difokuskan kepada konteks pekerjaan, yaitu perilaku diwujudkan untuk memperjelas deskripsi-deskripsi kerja menentukan kinerja yang memenuhi kebutuhan organisasi (Harris, 2019:23). Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, baik secara kuantitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Moeheriono, 2018:23)

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. (Jumali, 2018:86). Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan ketrampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakan sesuatu. Kinerja yang dicapai pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup organisasi. Dalam mencapai kinerja yang tinggi beberapa faktor yang mempengaruhi, menjadi pemicu apakah kinerja anggaran tinggi atau rendah. (Mangkunegara, 2016:16).

Kinerja individu pegawai merupakan fondasi dari kinerja organisasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami beberapa perilaku individu dalam organisasi sebelum menilai Kinerja individu seorang pegawai. Kinerja individu pegawai seringkali dikaitkan dengan karakteristik jenis pekerjaan, jenis industri, serta kemampuan teknologi dan sistem yang dipakai Suhud (2015:30). Dalam penelitian Goodhue (2018:99) pencapaian Kinerja individu pegawai dinyatakan berkaitan dengan pencapaian serangkaian tugas-tugas individu dengan dukungan teknologi informasi yang ada. Pengukuran Kinerja individu pegawai ini melihat dampak sistem informasi baru terhadap efektifitas penyelesaian tugas, membantu meningkatkan kinerja, dan menjadikan pemakai lebih produktif dan kreatif.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa Kinerja individu pegawai mengacu pada prestasi kerja individu yang diatur berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Kinerja individu pegawai yang tinggi dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

2.1.1.2 Indikator Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Indikator untuk mengukur Kinerja individu pegawai menurut Jumali (2018:86) adalah sebagai berikut;

1. Pemanfaatan sistem komputer
2. Layanan komputer
3. Produktif dan kreatif
4. Efektivitas dan produktivitas
5. Sarat layanan
6. Lebih produktif

2.1.2 Akuntabilitas

2.1.2.2 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Kusumastuti (2018:2) Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Menurut Mardiasmo (2018:24) akuntabilitas adalah suatu laporan yang dilakukan oleh instansi untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Adisasmita (2016:30) akuntabilitas adalah instrument pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi sertamisi organisasi. Menurut Penny Kusumastuti (2018:2) Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal

menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya.

Menurut Djalil (2018: 63) Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang memunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

Beberapa kajian teoritis menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau kelompok dalam suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan yang dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2.2 Tujuan Akuntabilitas

Menurut Bastian (2010:385) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Kemudian menurut Ghartey (2015:308) tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan

apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

2.1.2.3 Indikator Akuntabilitas

Menurut Halim (2018:20) menyatakan akuntabilitas adalah Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan. Menurut Mardiasmo (2016:24) indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan pemerintah tentang prosedur
2. Pengetahuan pemerintah tentang pembiayaan
3. Kemampuan pemerintah dalam menyampaikan hasil
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat
5. Adanya sarana bagi publik

2.1.3 Transparansi

2.1.3.1 Pengertian Transparansi

Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Menurut *United Nation Development Program (UNDP) Transparency* merupakan salah satu Karakteristik *Good Governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan, (Mardiasmo, 2018:20). Transparansi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam pemerintahan, termasuk diantaranya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah serta

implementasi kebijakan tersebut. Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Menurut Supriady dan Riyadi (2017:39) transparansi adalah suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan bersifat bebas, jelas dan terbuka. Istilah Transparansi dalam sekolah adalah keadaan dimana semua orang yang terkait di dalamnya terhadap kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan. Transparansi haruslah jelas dan tanpa adanya sedikitpun suatu rekayasa yang dikerjakan oleh sekolah. Sekolah harus memberikan informasi yang benar adanya dan dapat dipercaya oleh publik.

Menurut Mahmudi (2018:87) transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip-prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Menurut Sabarno (2017) transparansi adalah salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik”. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari

rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak pada orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan dana bantuan pemerintah dari perbuatan korupsi.

Permendagri No 13 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dan dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Menurut Mardiasmo (2018:20) menyatakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut merupakan pengertian akuntabilitas.

Penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran harus dilakukan secara transparan, hal ini berarti bahwa seluruh proses penyusunan anggaran harus semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Transparansi adalah

keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu (Mardiasmo, 2018:33)

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan suatu system pemerintahan yang di dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan.

2.1.2.2 Indikator Transparansi

Menurut Mardiasmo (2018:33) menyatakan transparansi kebijakan publik adalah keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu. Menurut Mardiasmo. (2018:33) indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Transparansi ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi
2. Dokumen-dokumen yang publikasi
3. Selalu tepat waktu
4. Usulan masyarakat selalu diakomodasi
5. Kemudahan dalam mengakses dokumen publik tentang anggaran.
6. Adanya sistem pemberian informasi kepada publik

Menurut Deddy dan Riyadi (2015:17) prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Menurut Deddy dan Riyadi (2015:17) Indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.

4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa *dan lembaga non pemerintah*

2.1.4 Partisipasi Masyarakat

2.1.4.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Suryono (2017:124) partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata “participation“ yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2017:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, perlibatan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam

meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

Menurut Handayani (2018:40) “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Menurut Supomo dan Indriantoro (2018:17) menyatakan partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Partisipasi secara luas pada dasarnya merupakan proses organisasional, dimana para individual terlibat dan mempunyai pengaruh dalam pembuatan keputusan yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap para individu tersebut.

Partisipasi mengandung makna adanya keterlibatan para karyawan dalam aspek-aspek mental dan emosional yang mendorong mereka untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Bentuk partisipasi ini sebenarnya merupakan proses komunikasi atau teknik mendapatkan dan memanfaatkan umpan balik dari

karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Namun dalam hal ini pihak karyawan tidak memiliki otoritas mengambil keputusan karena yang berwenang untuk suatu keputusan hanyalah prerogatif pihak manajemen. Karyawan hanyalah ikut dalam proses pengenalan atau identifikasi masalah, mengadakan monitoring dan evaluasi atas pekerjaannya, melaporkan kegiatannya, dan menyarankan atau mengusulkan saran-saran pemecahan masalah. Menurut Slamet (2017:6), berdasarkan pengertian partisipasi, maka partisipasi dalam pembangunan dapat dibagi menjadi lima jenis :

1. Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya.
2. Ikut memberi input dan menikmati hasilnya.
3. Ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung.
4. Menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input.
5. Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menerima hasilnya.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya

2.1.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Yuwono (2017:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut :

1. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
2. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.

3. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
4. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Selanjutnya menurut Slamet (2017:8) menyatakan bahwa, partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu :

1. Partisipasi politik (*political participation*)
Partisipasi ini lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
2. Partisipasi social (*social participation*)
Partisipasi ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi.
3. Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*)
Menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum terisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik.

2.1.4.3 Indikator Partisipasi Masyarakat

Menurut Deddy dan Riyadi (2015:4) menyatakan keterlibatan anggota masyarakat dalam segala jenis aktivitas pelaksanaan perencanaan pembangunan dikerjakan dalam masyarakat lokal. Dengan kata lain partisipasi atau peran masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi, kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam program yang dilaksanakan. Menurut Deddy dan Riyadi (2017:4) indikator partisipasi yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
2. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
3. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
4. Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan.
5. Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

Partisipasi masyarakat merupakan proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut Marschall (2016) dapat dilihat berdasarkan indikator, yaitu:

1. Adanya kontribusi
2. Adanya pengorganisasian
3. Peran masyarakat dan aksi masyarakat,
4. Motivasi masyarakat dan tanggung jawab masyarakat.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja SKPD, salah satunya adalah penelitian dari Sari (2020) dengan judul pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi Terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* di OPD Kabupaten Sleman. Hasil analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, pertama: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja anggaran, kedua: pengawasan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja anggaran berbasis *value for money* atas pengelolaan keuangan daerah.

Turalaki (2017) dengan judul penelitian Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pelayanan Di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pelayanan di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu penyebaran kuesioner terhadap 39 orang responden. Penelitian ini menggunakan Analisis Linear Berganda. Hasil penelitian ini: Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan, sedangkan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan, dan secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Premananda (2017) yang meneliti tentang Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar. Data dikumpulkan dengan metode survei dan Analisis Regresi Linear Berganda. Analisis memberi hasil yang menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi anggaran berimplikasi positif baik secara parsial maupun simultan pada kinerja anggaran Pemerintah Kota Denpasar. Variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi anggaran berimplikasi pada kinerja anggaran sejumlah 77,2 persen, dan sisanya 22,8 persen merupakan pengaruh dari variabel lainnya yang terlibat dalam model riset.

Penelitian sejenis dilakukan oleh Setiyawan dan Safri (2016) dengan judul Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi masyarakat Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan keuangan daerah, berpengaruh terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo. Secara parsial akuntabilitas, transparansi, partisipasi

masyarakat, dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo. Secara simultan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Secara parsial akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah bukan merupakan variabel intervening dalam penelitian ini.

Safitri (2016) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran karena hal ini dibuktikan dengan adanya pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang terbuka. Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran, hal ini dibuktikan karena pada penyelenggaraan pemerintah dilakukan secara terbuka pada masyarakat umum sehingga pengumuman anggaran dapat diperoleh dan diakses setiap saat oleh publik. Pengawasan juga berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran hal ini dibuktikan dengan adanya metode pengawasan anggaran daerah sesuai dengan undang-undang secara efektif. Untuk melihat persamaan dan perbedaan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama& Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Persamaan dan perbedaannya	Hasil Penelitian
1	Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi Terhadap kinerja anggaran berbasis <i>value for money</i> di OPD Kabupaten Sleman (Sari, 2020)	1. Akuntabilitas 2. Transparansi 3. Partisipasi masyarakat 4. Kinerja SKPD	a. Persamaannya – Akuntabilitas – Transparansi – Partisipasi masyarakat – Kinerja SKPD b. Perbedaannya – Jumlah sampel – Lokasi penelitian	Hasil analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan secara parsial akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja anggaran, pengawasan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja anggaran berbasis value for money atas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Sleman. Secara simultan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja anggaran, kinerja anggaran berbasis value for money atas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Sleman.
2.	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pelayanan Di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. (Turalaki, 2017)	1. Akuntabilitas 2. Transparansi 3. Kinerja SKPD	a. Persamaannya – Akuntabilitas – Transparansi – Kinerja SKPD b. Perbedaannya – Jumlah sampel – Lokasi penelitian	Hasil penelitian ini: Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan, sedangkan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan, dan secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan. Secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan.

3	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar (Premananda, 2017)	1. Akuntabilitas 2. Transparansi 3. Partisipasi masyarakat 4. Kinerja SKPD	a. Persamaannya – Akuntabilitas – Transparansi – Partisipasi masyarakat – Kinerja SKPD b. Perbedaannya – Jumlah sampel – Lokasi penelitian	Hasil yang menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi anggaran berimplikasi positif baik secara parsial maupun simultan pada kinerja anggaran Pemerintah Kota Denpasar. Variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi anggaran berimplikasi pada kinerja anggaran. Secara simultan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Pemerintah Kota Denpasar
4	Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi masyarakat Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo (Setiyawan dan Safri, 2016)	1. Akuntabilitas 2. Transparansi 3. Partisipasi masyarakat 4. Kinerja SKPD	a. Persamaannya – Akuntabilitas – Transparansi – Partisipasi masyarakat – Kinerja SKPD b. Perbedaannya – Jumlah sampel – Lokasi penelitian	Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis secara parsial akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo. Secara simultan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo..
5	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya). (Safitri, 2016)	1. Akuntabilitas 2. Transparansi 3. Partisipasi masyarakat 4. Kinerja Anggaran	a. Persamaannya – Akuntabilitas – Transparansi – Partisipasi masyarakat – Kinerja SKPD b. Perbedaannya – Jumlah sampel – Lokasi penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran karena hal ini dibuktikan dengan adanya pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang terbuka. Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran, hal ini dibuktikan karena pada penyelenggaraan pemerintah dilakukan secara terbuka pada masyarakat umum sehingga pengumuman anggaran dapat diperoleh dan diakses setiap saat oleh publik. Pengawasan juga berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran hal ini dibuktikan dengan adanya metode pengawasan anggaran daerah sesuai dengan undang-undang secara efektif

Sumber: Data Diolah, 2021

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Akuntabilitas dengan Kinerja Anggaran SKPD

Akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang dipakai dalam suatu organisasi pemerintah atau lembaga yang tujuannya tidak untuk mendapatkan keuntungan, dan merupakan suatu bagian dari kedisiplinan ilmu. Masyarakat menuntut agar pemerintah dapat mengelola anggaran secara akuntabel, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas di sektor publik digunakan tidak hanya untuk meminimalisir kecenderungan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang tetapi dapat juga meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, serta pemerintah wajib mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada masyarakat, sedangkan transparansi pada pemerintah daerah dimaksudkan untuk menyajikan segala informasi kepada masyarakat secara terbuka dan sebenar-benarnya agar dapat dimengerti dan dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan.. Hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Premananda (2017) yaitu menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Setiawan (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, menyebutkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja paling sedikit mengandung 3 (tiga) prinsip, yaitu: prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan yang didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (*money follow function*), prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*), dan prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*). Sebelum adanya sistem anggaran berbasis kinerja, penerapan

anggaran tradisional cenderung menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros. Namun dengan adanya sistem anggaran berbasis kinerja, dominasi pemerintah dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan *internal cost awareness*, audit keuangan, audit kinerja, dan evaluasi kinerja eksternal.

2.3.2 Hubungan Transparansi dengan Kinerja Anggaran SKPD

Selain akuntabilitas yang ada dalam penyusunan anggaran adalah transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *Good corporate governance*. Perwujudan pemerintahan yang baik (*good corporate governance*) yang sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang profesional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Premananda (2017) yaitu menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Arifani (2018) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat,

serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat secara tidak proporsional.

Keterbukaan penerimaan peran serta masyarakat dapat terjadi bila adanya suatu kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya terhadap pokok-pokok kebijakan pemerintah, adanya kesempatan masyarakat melakukan diskusi dengan pemerintah dan perencana dan adanya pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Peran serta bentuk perlindungan hukum preventif, peran serta ini dapat berupa pengajuan keberatan terhadap rancangan keputusan atau rancangan pemerintah, dengar pendapat dengan pemerintah dll.

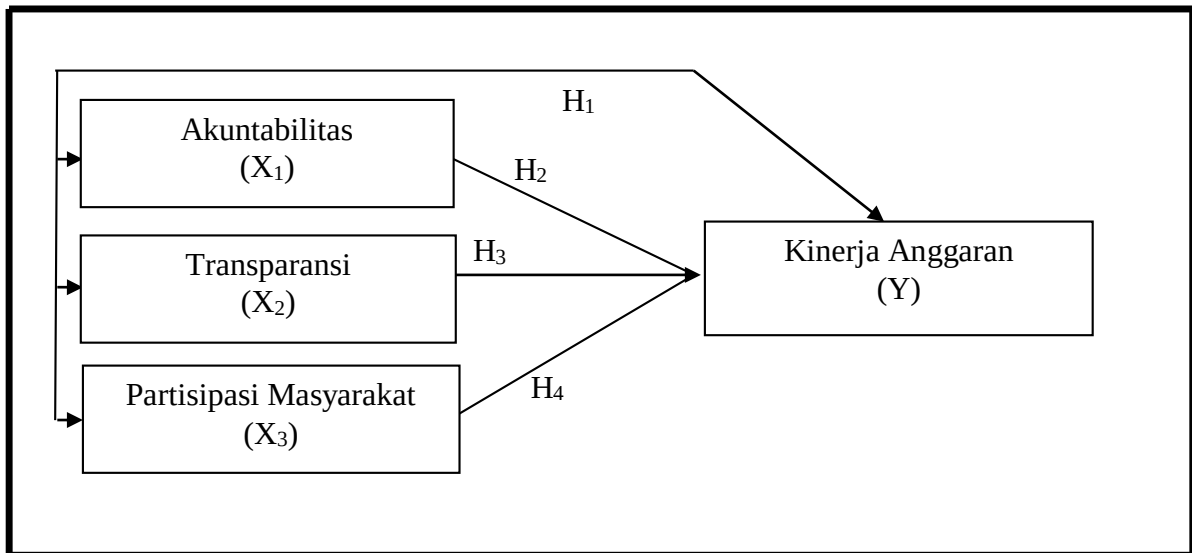
2.3.3 Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Kinerja Anggaran SKPD

Tujuan partisipasi masyarakat pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sesungguhnya terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali agar dapat segera diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat tercapai secara maksimal. Hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Setiawan (2016) yaitu menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Arifani (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

Salah satu aspek partisipasi masyarakat adalah pemeriksaan. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya telah sesuai dengan yang seharusnya”. Apabila terdapat indikasi-indikasi penyimpangan hal ini dapat segera dideteksi dan dapat segera diperbaiki. Selain itu adanya deteksi

penyimpangan dapat digunakan sebagai peringatan bagi suatu organisasi, bahwa mereka harus meningkatkan kewaspadaan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah:

H₁: Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

H₂: Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

H₃: Transparansi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

H4: Partisipasi masyarakat secara pasial berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penelitian yang dibuat sedemikian rupa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilakukan langsung pada beberapa kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Objek penelitian adalah pegawai bagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

3.1.1 Sifat Studi

Sifat studi dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya bersifat menjelaskan hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan dua atau lebih faktor dalam suatu situasi (Sekaran & Bougie, 2017:62). Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah menguji variabel bebas yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja anggaran.

3.1.2 Jenis Investigasi

Penelitian ini ingin menentukan penyebab atas permasalahan yang terjadi. Jenis investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kausal. Studi kausal adalah studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah (Sekaran & Bougie, 2017:64). Masalah yang terjadi dalam penelitian ini

adalah kinerja anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar berpotensi dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.

3.1.3 Tingkat Intervensi Peneliti

Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal. Peneliti tidak ikut mempengaruhi kondisi kinerja anggaran SKPD Kabupaten Aceh Besar. Oleh karena itu, tingkat intervensi peneliti rendah. Peneliti hanya mengumpulkan data berupa kuesioner yang telah diisi oleh pegawai SKPD Kabupaten Aceh Besar, dan selanjutnya menganalisis data tersebut.

3.1.4 Situasi Studi

Situasi studi dalam penelitian ini adalah tidak diatur. Peneliti ingin mengetahui pengaruh konflik peran dan beban kerja terhadap kepercayaan publik tanpa intervensi peneliti terhadap sumber data di lapangan. Oleh karena itu situasi studi berjalan dengan normal tanpa ada desakan atau pengaturan dari peneliti terhadap data-data di lapangan.

3.1.5 Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran & Bougie, 2017:73). Unit analisis dalam penelitian ini adalah pegawai SKPD Kabupaten Aceh Besar. Kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuesioner yang telah diisi oleh pegawai SKPD Kabupaten Aceh Besar yang menjadi responden penelitian ini.

3.1.6 Horizon Waktu

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah studi *one shot* atau *cross sectional*. Studi yang mengumpulkan data hanya sekali periode, baik harian, mingguan, maupun bulanan disebut studi dengan horizon waktu *one shot* atau *cross sectional* (Sekaran & Bougie, 2017:77). Data yang dikumpulkan hanya sekali periode yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kuesioner penelitian yang telah diisi oleh pegawai SKPD Kabupaten Aceh Besar.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah 74 orang (Berdasarkan judul penelitian, sampel dalam penelitian ini hanya pegawai di Bidang Anggaran dan Akuntansi). Menurut Notoatmodjo (2017:115) populasi penelitian adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar kecuali pada Kantor Camat. Menurut Sugiyono (2017:62)

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Data yang diperoleh sebagai hasil pengolahan sensus disebut data yang sebenarnya (*true value*), atau sering disebut parameter (Supranto, 2017). Metode penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu metode sensus dimana seluruh elemen populasi diselidiki satu per satu. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 2 pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Jumlah SKPD Kabupaten Aceh Besar

No	Nama SKPD Aceh Besar	Pegawai Bidang Anggaran	Pegawai Bidang Akuntansi	Jumlah Sampel
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1	1	2
2	Dinas Kesehatan	1	1	2
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	2
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1	1	2
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah	1	1	2
6	Dinas Sosial	1	1	2
7	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1	1	2
8	Dinas Pangan	1	1	2
9	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	2
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1	1	2
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong	1	1	2
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PP Dan PA	1	1	2
13	Dinas Perhubungan	1	1	2
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1	1	2
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	1	1	2
16	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	1	1	2
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1	1	2
18	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1	1	2
19	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	1	1	2
20	Dinas Pertanian	1	1	2
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	2
22	PPKD	1	1	2
23	DPRK	1	1	2
24	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	1	1	2
25	Sekretariat Daerah	1	1	2
26	Sekretariat DPRK	1	1	2
27	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	1	2
28	Inspektorat	1	1	2
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	1	1	2
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	2

31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1	1	2
32	Dinas Syariat Islam	1	1	2
33	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	2
34	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	2
35	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1	1	2
36	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	1	1	2
37	Sekretariat Baitul Mal	1	1	2
Jumlah		37	37	74

Sumber: Kabupaten Aceh Besar (2021)

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Survei kuesioner merupakan metode survei dengan menggunakan kuesioner penelitian. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang efektif karena dapat diperolehnya data standar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan analisis menyeluruh tentang karakteristik populasi yang diteliti. Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden atau meminta bantuan kepada salah satu pegawai untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan kuesioner pada pegawai tersebut sesuai jangka waktu yang ditentukan.

Menurut Lubis (2018:107) data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti pada saat berlangsungnya penelitian. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner. Noor (2019:139) menyatakan bahwa kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.

3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 4 variabel, yaitu masing-masing variabel terikat yaitu kinerja anggaran SKPD, variabel bebas yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Variabel-variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	Item Pertanyaan
Dependen					
1	Kinerja anggaran SKPD (Y)	Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. (Jumali, 2018:86)	Pemanfaatan sistem komputer	Likert	A1
			Layanan komputer		A2
			Produktif dan kreatif		A3
			Efektivitas dan produktivitas		A4
			Sarat layanan		A5
			Lebih produktif		A6
Independen					
1	Akuntabilitas (X ₁)	suatu laporan yang dilakukan oleh instansi untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2016:24)	Pengetahuan pemerintah tentang prosedur	Likert	B1
			Pengetahuan pemerintah tentang pembiayaan		B2
			Kemampuan pemerintah dalam menyampaikan hasil		B3
			Mampu memberikan ruang bagi masyarakat		B4
			Adanya sarana bagi publik		B5

2	Transparansi (X ₂)	Transparansi adalah keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu (Mardiasmo, 2018:33)	Memberikan informasi	Likert	C1
			Dokumen-dokumen yang dipublikasi		C2
			Selalu tepat waktu		C3
			Usulan masyarakat selalu diakomodasi		C4
			Kemudahan dalam mengakses dokumen publik tentang anggaran		C5
			Adanya sistem pemberian informasi kepada publik		C6
3	Partisipasi masyarakat (X ₃)	Partisipasi masyarakat merupakan proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. (Marschall, 2016)	Adanya kontribusi	Likert	D1
			Adanya pengorganisasian		D2
			Peran masyarakat dan aksi masyarakat,		D3
			Motivasi masyarakat dan tanggung jawab masyarakat.		D4

3.5 Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan uji secara bersama-sama dan uji secara individu dengan menggunakan software SPSS (*Statistica Product and Service Solutions*) versi 22. Adapun persamaan model regresi berganda dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja anggaran SKPD

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Transparansi

X_3 = Partisipasi masyarakat

a = Konstanta

b = Parameter Regresi

e = *Error Term*

Untuk mengubah data kualitatif Kategori pertanyaan yang dirancang dalam kuisisioner diberi nilai skor 1-5 dengan kategori menurut Arikunto (2018: 66) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Skala Pengukuran

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Kurang Setuju	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

Sumber : Arikunto (2018)

3.6 Pengujian Data

Pengujian kualitas data yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, maka kesediaan dan ketelitian dari para responden untuk menjawab setiap pertanyaan variabel-variabel yang merupakan suatu hal penting dalam penelitian ini. Kebebasan suatu jawaban sangat ditentukan oleh alat ukur yang ditemukan. Untuk itu, dalam melakukan uji kualitas data atas data primer ini peneliti melakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.6.1 Uji Keandalan (*Reliability*)

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variable atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam melihat reliabilitas masing-masing instrument yang digunakan, maka peneliti menggunakan koefisien *cronbach alpha*, yaitu suatu instrument dikatakan *reliable* jika memiliki nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,5 atau bila $r_{positif} > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan valid dalam Ghozali (2018:42).

3.6.2 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrument, dimana sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang akan diukurnya. Faktor-faktor yang mengurangi validitas data antara lain ketidakpatuhan responden mengikuti petunjuk pengisian kuesioner dan tidak tepatnya formulasi alat pengukur yaitu bentuk dan isi kuesioner. (Sugiyono, 2017:115). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *analysis corelation* yang menjelaskan korelasi (hubungan) diantara sejumlah variabel dengan menggunakan satu set dimensi yang disebut faktor. Ukuran data dianggap valid apabila korelasi hitung lebih besar dari angka kritis nilai $-r$ (*table product moment*).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas data menurut Ghozali (2018:110) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Kenormalan data-data dapat dilihat dari tampilan gambar normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menurut Ghozali (2018:91) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Bila ternyata dalam model regresi terdapat multikolinearitas, maka harus menghilangkan variabel *independent* yang mempunyai korelasi tinggi. Ghozali (2018:91) juga menambahkan jika korelasi antar variabel *independent* tinggi yaitu di atas 0,90 maka terdapat multikolinearitas. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 10% dan nilai VIF lebih besar dari 10 berarti ada multikolinearitas.

3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2018:110) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* antara SRESID dan ZPRED dengan dasar analisis (1) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik

yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas; (2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7 Rancangan Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

3.7.1. Uji Simultan (Uji F)

H_{01} : Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

H_{01} : Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, H_0 ditolak dan H_a diterima, Artinya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

3.7.2. Uji Parsial (uji t)

H_{02} : Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya akuntabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ho₂ : Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, Ho ditolak Ha diterima, artinya akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ho₃ : Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, Ho diterima dan Ha ditolak, artinya transparansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ho₃ : Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, Ho ditolak Ha diterima, artinya transparansi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ho₄ : Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, Ho diterima dan Ha ditolak, artinya partisipasi masyarakat secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ho₄ : Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, Ho ditolak Ha diterima, artinya partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, ibu kota Kabupaten Aceh Besar adalah Kota Banda Aceh. Setelah Kota Banda Aceh berpisah menjadi kotamadya tersendiri, ibukota kabupaten dipindahkan ke Jantho di Pegunungan Seulawah. Kabupaten Aceh Besar juga merupakan tempat kelahiran pahlawan nasional Cut Nyak Dhien yang berasal dari Lampadang.

Pada waktu Aceh masih sebagai sebuah kerajaan, yang dimaksud dengan Aceh atau Kerajaan Aceh adalah wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar ditambah dengan beberapa kenegerian/daerah yang telah menjadi bagian dari Kabupaten Pidie. Selain itu, juga termasuk Pulau Weh (sekarang telah menjadi pemerintah kota Sabang), sebagian wilayah pemerintah kota Banda Aceh, dan beberapa kenegerian/daerah dari wilayah Kabupaten Aceh Barat. Aceh Besar dalam istilah Aceh disebut Aceh Rayeuk. Penyebutan Aceh Rayeuk sebagai Aceh yang sebenarnya karena daerah inilah yang pada mulanya menjadi inti Kerajaan Aceh dan juga karena di situlah terletak ibukota kerajaan yang bernama Bandar Aceh atau Bandar Aceh Darussalam. Untuk nama Aceh Rayeuk ada juga yang menamakan dengan sebutan Aceh Lhee Sagoe

Wilayah darat Aceh Besar berbatasan dengan Kota Banda Aceh di sisi utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah barat daya, serta Kabupaten Pidie di sisi selatan dan tenggara. Aceh Besar juga mempunyai wilayah kepulauan yaitu wilayah Kecamatan

Pulo Aceh. Kabupaten Aceh Besar bagian kepulauan di sisi barat, timur dan utaranya dibatasi dengan Samudera Indonesia, Selat Malaka, dan Teluk Benggala, yang memisahkannya dengan Pulau Weh, tempat di mana Kota Sabang berada. Pulau-pulau utamanya adalah Pulau Breueh dan Pulau Nasi.

4.2 Karakteristik Responden

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini memiliki karakteristik berdasarkan umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir dan masa kerja yang terlihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Umur		
	a. 20-25 Tahun	4	5,4
	b. 26-31 Tahun	9	12,2
	c. 32-37 Tahun	24	32,4
	d. 38-43 Tahun	18	24,3
	e. 44-50 Tahun	14	18,9
	f. >51 Tahun	5	6,8
Jumlah		74	100
2	Jenis kelamin		
	a. Pria	41	54,4
	b. Wanita	33	44,6
Jumlah		74	100
3	Status Perkawinan		
	a. Belum Menikah	10	13,5
	b. Menikah	64	86,5
Jumlah		74	100
4.	Pendidikan Terakhir		
	a. Diploma	18	24,3
	b. Sarjana (S1)	50	67,6
	c. pasca sarjana (S2)	6	8,1

Tabel 4.1 Lanjutan

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Umur		
	g. 20-25 Tahun	4	5,4
	h. 26-31 Tahun	9	12,2
	i. 32-37 Tahun	24	32,4
	j. 38-43 Tahun	18	24,3
	k. 44-50 Tahun	14	18,9
	l. >51 Tahun	5	6,8
Jumlah		74	100
2	Jenis kelamin		
	c. Pria	41	54,4
	d. Wanita	33	44,6
Jumlah		74	100
3	Status Perkawinan		
	c. Belum Menikah	10	13,5
	d. Menikah	64	86,5
Jumlah		74	100
4.	Pendidikan Terakhir		
	a. Diploma	18	24,3
	b. Sarjana (S1)	50	67,6
	c. pasca sarjana (S2)	6	8,1
Jumlah		74	100
5.	Masa Kerja		
	a. < 5 tahun	6	8,1
	b. 6-10 tahun	10	13,5
	c. 11-15 tahun	17	23,0
	d. > 16 tahun	41	55,4
Total		74	100

Sumber: Data diolah, 2022

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa responden yang berusia antara 20 sampai 25 tahun sebanyak 4 responden atau 5,4% , yang berusia antara 26 sampai dengan 31 tahun yaitu sebanyak 7 responden atau 12,2%, yang berusia antara 32 sampai dengan 37 tahun yaitu sebanyak 24 responden atau 32,4%, yang berusia antara 38 sampai dengan 43 tahun sebanyak 18 responden atau 24,3%, berusia antara 44 sampai dengan 50 tahun sebanyak 14 responden atau 18,9% dan yang berusia di atas 51 tahun sebanyak 5 responden atau 6,8%

Dari Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 41 responden atau 55,4% dan responden berjenis kelamin wanita yaitu sebanyak 33 responden atau 44,6%. Kemudian Karakteristik berdasarkan status perkawinan dapat dijelaskan yang belum menikah adalah sebanyak 10 responden atau 13,5% dan yang sudah menikah sebanyak 64 responden atau 86,5%

Karakteristik berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan yang berpendidikan terakhir Diploma yaitu sebanyak 18 responden atau 24,3%, yang berpendidikan terakhir sarjana yaitu sebanyak 50 responden atau 67,6% dan yang berpendidikan pasca sarjana sebanyak 6 responden atau 8,1%.

Mengenai tingkat pendapatan responden dapat dijelaskan bahwa sebanyak 6 responden atau 8,1% dengan masa kerja dibawah 5 tahun, sebanyak 10 responden atau 13,5% dengan masa kerja antara 6 sampai 10 tahun, sebanyak 17 responden atau 23% dengan masa kerja antara 11 sampai 15 tahun dan sebanyak 41 responden atau 55,4% dengan masa kerja di atas 15 tahun.

4.3 Hasil Pengujian Data

4.3.1 Uji Validitas Instrumen

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji *pearson product-moment coefficient of correlation* dengan bantuan SPSS. Hasil Uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Hasil Uji Validitas

No pertanyaan		Variabel	Koefisien korelasi	Nilai kritis 5 % (N=74)	Ket
1	A1	Y	0,544	0,235	Valid
2	A2		0,521	0,235	Valid
3	A3		0,675	0,235	Valid
4	A4		0,548	0,235	Valid
5	A5		0,533	0,235	Valid
6	A6		0,528	0,235	Valid
7	B1	X1	0,478	0,235	Valid
8	B2		0,402	0,235	Valid
9	B3		0,376	0,235	Valid
10	B4		0,458	0,235	Valid
11	B5		0,407	0,235	Valid
12	C1	X2	0,328	0,235	Valid
13	C2		0,376	0,235	Valid
14	C3		0,417	0,235	Valid
15	C4		0,438	0,235	Valid
16	C5		0,430	0,235	Valid
17	C6		0,587	0,235	Valid
18	D1	X3	0,539	0,235	Valid
19	D2		0,552	0,235	Valid
20	D3		0,682	0,235	Valid
21	D4		0,518	0,235	Valid

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan semuanya valid, karena mempunyai koefisien korelasi diatas dari nilai kritis korelasi *product moment* yaitu sebesar 0,235 sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

Semua pernyataan mempunyai nilai korelasi diatas nilai kritis 5 % yaitu di atas 0,235, sehingga pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan dan memiliki validitas. Atau dalam bahasa statistik terdapat konsistensi (*internal consistence*) yang

berarti pernyataan-pernyataan tersebut mengukur aspek yang sama. Ini berarti data yang diperoleh adalah valid dan dapat dipergunakan untuk penelitian.

4.3.2. Uji Reliabilitas Instrumen

Pengujian Reliabilitas dilakukan dengan internal *consistency* atau derajat ketepatan jawaban. Untuk pengujian ini digunakan *Statistical Packaged for Social Sciences* (SPSS). Setelah melakukan pengujian reliabilitas untuk mengetahui konsistensi hasil sebuah jawaban tentang tanggapan responden. Untuk melakukan pengujian reliabilitas penulis menggunakan program SPSS.

Tabel 4.3
Uji Reliabilitas variabel penelitian (Alpha)

No	Variabel	Item Variabel	Nilai Alpha	Kehandalan
1.	Kinerja anggaran (Y)	6	0,801	Handal
2.	Akuntabilitas (X ₁)	5	0,703	Handal
3.	Transparansi (X ₂)	6	0,767	Handal
4.	Partisipasi masyarakat (X ₃)	4	0,769	Handal

Sumber : data diolah 2022

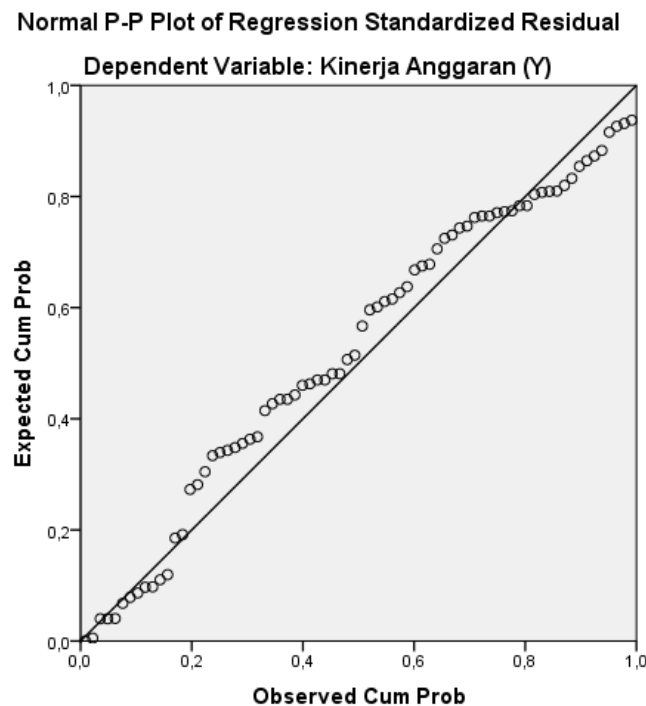
Hasil uji Reliabilitas dapat dilihat dari nilai cronbach Alpha, nilai *cronbach alpa reliabilitas* yang baik adalah yang makin mendekati 1, Reliabilitas yang kurang dari 0,60 adalah kurang baik, sedangkan lebih dari 0,60 dapat diterima dan reliabilitas dengan *cronbach alpa* 0,80 atau diatasnya adalah baik. Dari hasil pengujian reliabilitas diatas dapat diketahui bahwa reliabilitas variabel keputusan pembelian berdasarkan pengujian reliabilitas dari instrumen, diketahui bahwa hasil pengujian variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat seluruhnya adalah reliabel karena melebihi dari 0,60.

4.3.3. Pengujian Asumsi Klasik

4.3.3.1 Uji Normalitas

Untuk pengujian normalitas data, dalam penelitian ini hanya akan dideteksi melalui Analisis Grafik yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS. Data yang normal ditandai dengan sebaran titik-titik data diseputar garis diagonal. Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan Gambar 4.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan menunjukkan indikasi normal. Analisis dari grafik diatas terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. “Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, dan sebaliknya apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi

tidak memenuhi asumsi-asumsi normalitas”. Maka model regresi layak dipakai untuk memprediksi keputusan pembelian berdasarkan masukan variabel independen.

4.3.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas. Pada model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk uji multikolinearitas pada penelitian ini adalah melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF).

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Toleransi	VIF	Keterangan
Kepemimpinan (X_1)	0,880	1,136	Non Multikolinieritas
Lingkungan Kerja Non Fisik(X_2)	0,344	2,910	Non Multikolinieritas
Kompensasi (X_3)	0,347	2,879	Non Multikolinieritas

Sumber: Hasil Penelitian, 2022 (Data diolah)

Dari Tabel IV.4 diatas dapat menunjukkan bahwa tidak ada satu variable independen yang memiliki nilai Tolerance yang kurang dari 0,10 berarti tidak ada korelasi antara variabel independen. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

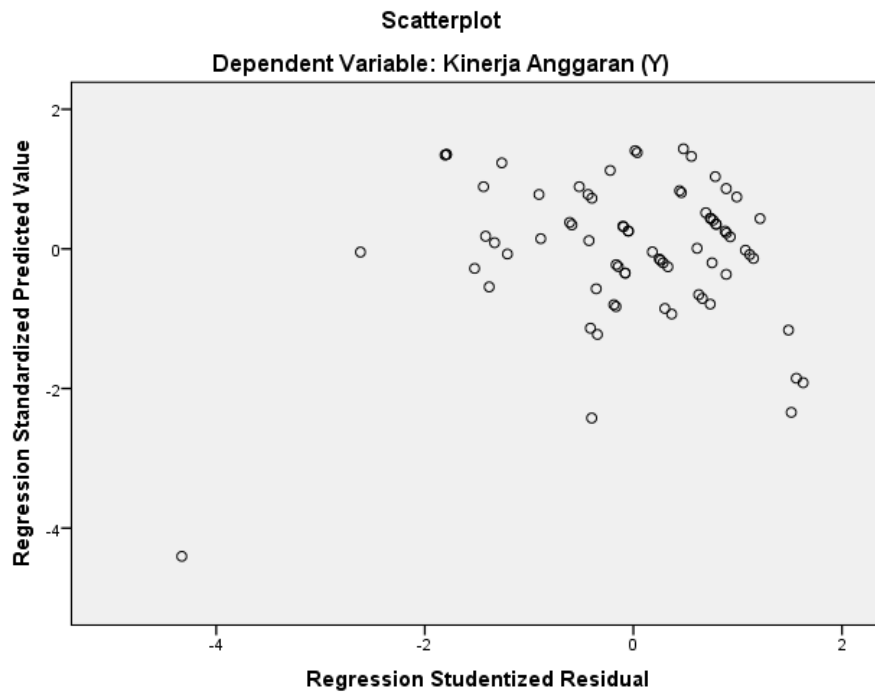
4.3.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka

disebut Homoskedastisitas, dan jika varians berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS dengan mengamati pola yang terdapat pada Scatterplot, dimana hasilnya dapat dilihat pada Gambar 4.2 sebagai berikut:

Gambar 4.2

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Penelitian, 2022 (Data diolah)

Dari Gambar 4.2 uji heteroskedastisitas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas

4.4 Analisis Deskriptif

Penelitian ini mengamati tiga variabel bebas (*independent variabel*) yaitu variabel akuntabilitas (X_1), variabel transparansi (X_2) dan variabel partisipasi masyarakat (X_3) dan juga mengamati satu variabel terikat (*dependent variable*) yaitu kinerja anggaran (Y).

4.4.1 Variabel Kinerja Anggaran

Penjelasan responden tentang variabel kinerja anggaran pada dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kinerja Anggaran

No	Item pernyataan	Tdk Setuj		Tidak Setuju		urang Setuj		Setuju		ngat Setu		Rerata
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Pemanfaatan sistem komputer dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran	0	0	1	1,4	1	1,4	28	37,8	44	59,5	4,55
2	Adanya layanan komputer mampu membuat laporan kinerja anggaran yang lebih efektif	0	0	1	1,4	1	1,4	34	45,9	38	51,4	4,47
3	Aktivitas kinerja anggaran dapat dipenuhi oleh sistem komputer organisasi	0	0	1	1,4	2	2,7	28	37,8	43	58,1	4,53

Tabel 4.5 Lanjutan

No	Item pernyataan	Tdk Setuj		Tidak Setuju		urang Setuj		Setuju		ngat Setu		Rerata
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
4	Penggunaan anggaran yang efektivitas dan produktivitas dapat	0	0	1	1,4	3	4,1	36	48,6	34	45,9	4,39

	meningkatkan kepercayaan masyarakat											
5	Sistem komputer yang aparaturnya memanfaatkan sangat penting dalam membantu meningkatkan kinerja anggaran	0	0	1	1,4	3	4,1	29	39,2	41	55,4	4,49
6	Setelah menggunakan sistem komputer penggunaan kinerja anggaran menjadi lebih baik	0	0	1	1,4	6	8,1	33	52,7	28	37,8	4,27
Rerata												4,45

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas pada indikator pertama bahwa pemanfaatan sistem komputer dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,55. Adanya layanan komputer mampu membuat laporan kinerja anggaran yang lebih efektif diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,47. Aktivitas kinerja anggaran dapat dipenuhi oleh sistem komputer organisasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 4, 53. Penggunaan anggaran yang efektivitas dan produktivitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,39. Sistem komputer yang aparaturnya memanfaatkan sangat penting dalam membantu meningkatkan kinerja anggaran diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,49. Setelah menggunakan sistem komputer penggunaan kinerja anggaran menjadi lebih baik diperoleh nilai rata-rata 4,27, yang berarti responden menyatakan setuju. Nilai rerata pada variabel kinerja anggaran sebesar 4,45 artinya responden menyatakan setuju

4.4.2 Variabel Akuntabilitas

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai akuntabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas

No	Item pernyataan	Sgt Tdk Se		Tidak Setu		Kurang Se		Setuju		Sangat Setuju		Rerata
		Frk	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Aparatur memahami tentang prosedur kerja yang diterapkan pada instansi	0	0	0	0	4	5,4	36	48,6	34	45,9	4,41
2	Aparatur memahami tentang pembiayaan pemerintahan	0	0	0	0	5	6,8	46	62,2	23	31,1	4,24
3	Aparatur memiliki kemampuan keuangan yang baik dalam menyampaikan hasil	0	0	0	0	6	8,1	38	61,4	30	20,5	4,32
4	Aparatur dapat menerima berbagai pendapat dari masyarakat	0	0	0	0	5	6,8	42	56,8	27	36,5	4,30
5	Adanya sarana dan prasarana dapat membantu aparatur dalam menyelesaikan tugas	0	0	1	1,4	6	8,1	39	12,7	28	37,8	4,27
Rerata												4,31

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dijelaskan indikator yang pertama yaitu aparatur memahami tentang prosedur kerja yang diterapkan pada instansi diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,41. Aparatur memahami tentang pembiayaan pemerintahan diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,24. Aparatur memiliki kemampuan keuangan yang baik dalam menyampaikan hasil diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,32. Aparatur dapat menerima berbagai pendapat dari masyarakat diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,30.

Adanya sarana dan prasarana dapat membantu aparatur dalam menyelesaikan tugas diperoleh nilai rata-rata 4,27, yang berarti responden menyatakan setuju. Nilai rerata pada variabel akuntabilitas Kerja sebesar 4,31 artinya responden menyatakan setuju.

4.4.3 Variabel Transparansi

Hasil penelitian tentang penjelasan responden terhadap variabel transparansi dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Transparansi

No	Item pernyataan	Sgt Tdk Setu		Tidak Setuju		Kurang Setu		Setuju		angat Set		Rerata
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Aparatur dapat memberikan berbagai informasi keuangan yang dibutuhkan oleh aparatur	0	0	0	0	2	2,7	32	43,2	40	4,1	4,51
2	Dokumen yang dipublikasi sudah sesuai dengan prosedur	0	0	0	0	1	1,4	31	41,9	42	56,8	4,55
3	Aparatur dapat menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu	0	0	0	0	2	2,7	37	50,0	35	47,3	4,45
4	Berbagai usulan dari masyarakat dapat ditanggapi dengan baik	0	0	1	1,4	3	4,1	35	47,3	35	47,3	4,41

Tabel 4.7 Lanjutan

No	Item pernyataan	Sgt Tdk Setu		Tidak Setuju		Kurang Setu		Setuju		angat Set		Rerata
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
5	Adanya kemudahan dalam mengakses dokumen tentang anggaran membuat	0	0	1	1,4	4	5,4	39	52,7	30	40,5	4,32

	aparatur lancer membuat laporan											
6	Adanya sistem pemberian informasi dapat membantu aparatur dalam menyelesaikan tugas	0	0	2	2,7	3	4,1	31	41,9	38	51,4	4,32
Rerata												4,44

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dijelaskan indikator yang pertama yaitu aparatur dapat memberikan berbagai informasi keuangan yang dibutuhkan oleh aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,51. Dokumen yang dipublikasi sudah sesuai dengan prosedur diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,55. Aparatur dapat menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,45. Berbagai usulan dari masyarakat dapat ditanggapi dengan baik diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,41. Adanya kemudahan dalam mengakses dokumen tentang anggaran membuat aparatur lancer membuat laporan diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,32. Adanya sistem pemberian informasi dapat membantu aparatur dalam menyelesaikan tugas diperoleh nilai rata-rata 4,42, yang berarti responden menyatakan setuju. Nilai rerata pada variabel transparansi sebesar 4,44 artinya responden menyatakan setuju.

4.4.4 Variabel Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai variabel partisipasi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Partisipasi Masyarakat

No	Item pernyataan	Sgt Tdk Setu		Tidak Setuju		Kurang Setu		Setuju		angat Set		Rerata
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD.	0	0	1	1,4	7	9,5	40	54,1	26	35,1	4,51
2	Kritik dan saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi APBD.	0	0	0	0	14	15,4	36	48,6	34	45,9	4,41
3	Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD selalu melibatkan masyarakat dan Masyarakat selama ini selalu dilibatkan dalam konsultasi publik tentang pelaksanaan APBD	0	0	1	1,4	4	5,4	39	52,7	30	20,5	4,32
4	Masyarakat memberikan motivasi dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur	0	0	2	2,7	3	4,1	31	41,9	38	51,4	4,42
Rerata												4,34

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dijelaskan dari indikator yang pertama bahwa Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,23. Kritik dan saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi APBD diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,41. Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD selalu melibatkan masyarakat dan Masyarakat selama ini selalu dilibatkan dalam konsultasi publik tentang pelaksanaan APBD diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,32. Masyarakat

memberikan motivasi dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,42, yang berarti responden menyatakan setuju. Nilai rerata pada variabel partisipasi masyarakat sebesar 4,34 artinya responden menyatakan setuju.

4.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

4.5.1 Pengujian Hipotesis

Hipotesis menyatakan bahwa faktor-faktor akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2) dan partisipasi masyarakat (X_3) berpengaruh terhadap Kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Model yang digunakan untuk menduga pengaruh tersebut adalah:

Tabel 4.9
Pengaruh variabel bebas terhadap Kinerja anggaran

Nama variabel	B	Std Error	thitung	ttabel	Sig.
Konstanta	1,825	0,623	2,929	1,994	0,005
Akuntabilitas (X_1)	0,236	0,107	2,207	1,994	0,037
Transparansi (X_2)	0,241	0,106	2,273	1,994	0,031
Partisipasi masyarakat (X_3)	0,425	0,142	2,992	1,994	0,004

Sumber: Hasil Penelitian, 2022 (Data diolah)

Berdasarkan hasil SPSS seperti terlihat tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut,

$$Y = 1,825 + 0,236X_1 + 0,241X_2 + 0,425X_3$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diketahui hasil penelitian sebagai berikut:

1) Koefesien Regresi (β)

- a. Dalam penelitian nilai konstanta adalah 1,825 artinya bila mana akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2) dan partisipasi masyarakat (X_3),

dianggap konstan, maka kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, adalah sebesar 1,825 pada satuan skala likert

- b. Koefisien regresi akuntabilitas (X_1) sebesar 0,236. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel akuntabilitas akan meningkatkan kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar sebesar 23,6% dengan asumsi variabel transparansi (X_2) dan partisipasi masyarakat (X_3) dianggap konstan.
- c. Koefisien regresi transparansi (X_2) sebesar 0,241. Artinya setiap 100 % perubahan dalam variabel transparansi secara relatif akan meningkatkan kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar sebesar 24,1% dengan asumsi variabel akuntabilitas (X_1), dan partisipasi masyarakat (X_3) dianggap konstan
- d. Koefisien regresi Partisipasi masyarakat (X_3) sebesar 0,425. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel partisipasi masyarakat secara relatif akan meningkatkan kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. sebesar 42,5% dengan asumsi variabel Akuntabilitas (X_1) dan transparansi (X_2), dianggap konstan.

2) Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar kenaikan suatu linier dapat dijelaskan melalui hubungan antara variabel-variabel (korelasi). Jika seluruh nilai dari variabel-variabel tersebut dapat memenuhi suatu persamaan dengan benar,

maka dapat dikatakan terdapat korelasi yang sempurna dalam model analisis ini. Dari output SPSS dapat diketahui tingkat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat antara lain:

Tabel 4.10
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,697 ^a	,456	,428	,36533

a. Predictors: (Constant), Partisipasi masyarakat (X3), Transparansi (X2), Akuntabilitas (X1)

Berdasarkan dari output komputer diatas maka diperoleh koefisien korelasi dalam penelitian diperoleh nilai sebesar 0,679 dimana dengan nilai tersebut terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 67,9%. Artinya faktor akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2), dan partisipasi masyarakat (X_3) mempunyai hubungan yang kuat terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Sementara itu koefisien determinasi yang diperoleh dengan nilai sebesar 0,428 artinya bahwa sebesar 42,8% perubahan-perubahan dalam variabel terikat (kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2) dan partisipasi masyarakat (X_3). Sedangkan selebihnya sebesar 57,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar tiga variabel seperti dijelaskan di atas seperti kompetensi SDM, kemampuan kerja, pengendalian internal dan pengawasan.

4.5.2 Uji Simultan (uji F)

Untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan Partisipasi masyarakat secara simultan terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. digunakan uji Statistik F (uji F). Apabila nilai $F_{hitung} > \text{nilai } F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sebaliknya apabila nilai $F_{hitung} < \text{nilai } F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil uji secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F_{hitung}	F_{tabel}	Sig.
1 Regression	5,162	3	1,721	12,892	2,737	,000 ^b
Residual	9,343	70	,133			
Total	14,505	73				

Sumber: Hasil Penelitian, 2022 (Data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 12,892 dengan signifikansi 0,000, sedangkan F_{table} pada tingkat kepercayaan (*confidence interval*) 95% atau $\alpha = 0,05$ adalah 2,737. Dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{table} , maka F_{hitung} (12,892) lebih besar dari F_{table} (2,737). Keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara simultan variabel akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2) dan partisipasi masyarakat (X_3) berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

4.5.3 Uji Parsial (uji t)

Untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Aceh Besar., digunakan uji Statistik t (uji t). Apabila nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sebaliknya apabila nilai $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4.9. Dapat ketahui besarnya nilai t_{hitung} dari setiap variabel independen dalam penelitian ini. Nilai t_{hitung} dari setiap variabel independen akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} dengan menggunakan tingkat kepercayaan (confidence interval) 95% atau $\alpha = 0,05$.

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran

Pengaruh akuntabilitas (X_1) terhadap variabel kinerja anggaran (Y) secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4.9 nilai t_{hitung} (2,207) lebih besar dari t_{tabel} (1,994), maka keputusannya adalah menolak H_0 dan menerima H_a . Dari hasil uji signifikansi secara parsial bahwa terdapat pengaruh dan signifikan antara akuntabilitas terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, artinya akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

2. Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran

Pengaruh transparansi terhadap variabel Kinerja anggaran (Y) secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4.9 nilai t_{hitung} (2,273) lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,994) nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$, maka keputusannya adalah menolak H_0 dan menerima H_a . Dari hasil uji signifikansi secara parsial bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Anggaran

Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap variabel kinerja anggaran (Y) secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4.9 nilai t_{hitung} sebesar 2,992 sedangkan nilai t_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% adalah 1,994. oleh karena t_{hitung} (2,992) lebih besar dari t_{tabel} (1,994) maka menolak H_a dan menerima H_0 . Artinya faktor partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Anggaran

Dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} , maka F_{hitung} (12,892) lebih besar dari F_{tabel} (2,737). Keputusannya adalah menerima H_{a3} dan menolak H_{03} , artinya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Sari (2020) karena variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat sama-sama berpengaruh terhadap kinerja anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat maka dapat meningkatkan kinerja anggaran.

4.6.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Anggaran

Dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , maka t_{hitung} (2,207) lebih besar dari t_{tabel} (1,994). Dari hasil uji secara parsial bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh

Besar. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Premananda (2017) dan Setiawan (2016) karena variabel akuntabilitas yang diteliti sama-sama berpengaruh terhadap kinerja anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya akuntabilitas yang baik maka dapat berdampak baik pada kinerja anggaran seperti kemampuan aparatur, keterampilan, pemahaman dan pengetahuan dalam pelaporan keuangan. Akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang dipakai dalam suatu organisasi pemerintah atau lembaga yang tujuannya tidak untuk mendapatkan keuntungan, dan merupakan suatu bagian dari kedisiplinan ilmu. Masyarakat menuntut agar pemerintah dapat mengelola anggaran secara akuntabel, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas di sektor publik digunakan tidak hanya untuk meminimalisir kecenderungan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang tetapi dapat juga meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, serta pemerintah wajib mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada masyarakat, sedangkan transparansi pada pemerintah daerah dimaksudkan untuk menyajikan segala informasi kepada masyarakat secara terbuka dan sebenar-benarnya agar dapat dimengerti dan dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

4.6.3 Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran

Dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , maka t_{hitung} (2,273) lebih besar dari t_{tabel} (1,994). Dari hasil uji secara parsial bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari

Premananda (2017) dan Arifani (2018) karena variabel akuntabilitas yang diteliti sama-sama berpengaruh terhadap kinerja anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya transparansi yang baik maka dapat berdampak baik pada kinerja anggaran.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat secara tidak proporsional.

Keterbukaan penerimaan peran serta masyarakat dapat terjadi bila adanya suatu kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya terhadap pokok-pokok kebijakan pemerintah, adanya kesempatan masyarakat melakukan diskusi dengan pemerintah dan perencana dan adanya pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Peran serta bentuk perlindungan hukum preventif. peran serta ini dapat berupa pengajuan keberatan terhadap rancangan keputusan atau rancangan pemerintah.

4.6.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Anggaran

Dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , maka t_{hitung} (2,992) lebih besar dari t_{tabel} (1,994). Dari hasil uji secara parsial bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Setiawan (2016) dan Arifani (2018) karena variabel partisipasi masyarakat yang diteliti sama-sama berpengaruh terhadap kinerja anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat yang diberikan maka semakin meningkat kinerja anggaran. Salah satu aspek partisipasi masyarakat adalah pemeriksaan. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya telah sesuai dengan yang seharusnya”. Apabila terdapat indikasi-indikasi penyimpangan hal ini dapat segera dideteksi dan dapat segera diperbaiki. Selain itu adanya deteksi penyimpangan dapat digunakan sebagai peringatan bagi suatu organisasi, bahwa mereka harus meningkatkan kewaspadaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Hal ini disebabkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat mampu meningkatkan kinerja anggaran seperti pemanfaatan sistem komputer dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, dengan adanya layanan komputer mampu membuat laporan kinerja anggaran yang lebih efektif, aktivitas kinerja anggaran dapat dipenuhi oleh sistem komputer organisasi dan penggunaan anggaran yang efektivitas dan produktivitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat
2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Artinya semakin baik akuntabilitas maka semakin meningkat kinerja anggaran seperti aparatur dapat memahami tentang prosedur kerja yang diterapkan pada instansi, kemudian aparatur memahami tentang pembiayaan pemerintahan dan memiliki kemampuan keuangan yang baik dalam menyampaikan hasil dan dapat menerima berbagai pendapat dari masyarakat.

3. Transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Artinya semakin baik transparansi maka semakin meningkat kinerja anggaran seperti aparatur dapat memberikan berbagai informasi keuangan yang dibutuhkan oleh aparatur, kemudian dokumen yang dipublikasi sudah sesuai dengan prosedur, aparatur dapat menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu dan adanya kemudahan dalam mengakses dokumen tentang anggaran membuat aparatur lancar membuat laporan serta adanya sistem pemberian informasi dapat membantu aparatur dalam menyelesaikan tugas.
4. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Artinya semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin meningkat kinerja anggaran seperti pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD, kritik dan saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi APBD, kemudian dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD selalu melibatkan masyarakat dan masyarakat selama ini selalu dilibatkan dalam konsultasi publik tentang pelaksanaan APBD serta masyarakat memberikan motivasi dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pimpinan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar dapat menerapkan akuntabilitas yang sesuai dengan peraturan atau prosedur yang berlaku, hal ini perlu dilakukan agar aparatur dapat menyelesaikan tugas dengan baik dengan akuntabilitas yang berdampak baik pada instansi.
2. Disarankan kepada aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar dapat membuat laporan keuangan yang transparansi, hal ini perlu dilakukan agar kepercayaan masyarakat dapat meningkat serta masyarakat dapat mengandalkan laporan keuangan dari aparatur
3. Disarankan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar agar selalu memberikan dukungan kepada aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar dalam menyelesaikan tugas yang akuntabilitas dan transparan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh menerima masukan dari masyarakat dalam hal memperbaiki kesalahan atau kekurangan kinerja anggaran dari aparatur untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan efektif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul, Halim.dkk. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 4*. Jakarta: Salemba
- Adisasmita, Raharjo (2016). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arifani, Cindy. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume 13, Nomor 1*
- Arikunto, Suharsimi (2018) *Manajemen Penelitian*. Cetakan keenam.Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Bastian, Indra.(2018). *Sistem Pengendalian Manajemen SektorPublik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bharoto, M. H. (2015) Pengaruh Perencanaan Dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Air Minum Di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon. *Artikel Manajemen*
- Chandra, K. A. (2017) Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, Keahlian Pengguna, Kepercayaan, Kesesuaian Tugas, Dan Partisipasi Manajemen Terhadap Kinerja Individu (Studi Pada Perusahaan Asuransi Surakarta). *Artikel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- Deddy dan Riyadi. (2017). *Perencanaan Pembangunan Derah*. Jakarta: SUN
- Djalil,Rizal. (2018). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta:PT semesta Rakyat Merdeka.
Empat
- Fahmi, Irham (2018) *Perilaku Organisasi: Teori, Aplikasi Dan Kasus*. Alfabeta, Bandung.
- Ghozali, Imam (2018) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Goodhue, D L (2018) *Understanding User Evaluation Of Information System, Management Sciente*. Desember,1827-1844
- Halim dan Kusufi. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Handayani, Suci. (2018). *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama)*. Surakarta: Kompip Solo

- Irawan, Bambang (2018) Pengaruh Kemampuan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Manajemen Universitas Mulawarman Samarinda*
- Isbandi, Rukminto Adi. (2017). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI press
- J.B Gharthey (2017) *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Jumali, M.dkk. (2018). *Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta Salemba Empat
- Lubis, A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat
- Malhotra, Naresh. (2018). Basic Marketing Research. Pearson Education. England.
- Mangkunegara AA. Anwar Prabu. (2016). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Rafika Aditama
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marschall B. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Alihbahasa : Kikin Sakinah
- Mulyadi. (2017). *Akuntansi Biaya*, Edisi 5. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu. Manajemen YKPN.
- Murhaini, Suriansyah (2018) *Manajemen Pengawasan Pemerintah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Noor, A. (2019). *Manajemen Event*. Bandung : Alfabeta.
- Oktasari, Rosy. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Di Dprd Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- Penny,kusumastuti, (2018). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 *Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 *Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

- Premananda, Ni Lu Puttu. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.18. No 3.
- Rachman, A. A. (2018). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Safitri, D. D. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 1, No. 1
- Sari, R. P. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, Hal 1-11
- Sekaran, U. (2017). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Setiyawan, Hari Eka., dan Safri, Muhammad. (2016). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol. 4 No. 1
- Slamet, M. (2017). *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suhud, Sheilla Putri (2015) *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu Pegawai Distro Di Kota Bandung*. Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
- Supomo dan Indriantoro, Nur (2018). *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. Yogyakarta
- Supriady, Deddy dan Riyadi. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: SUN
- Suryawan, I. K. (2018) Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individual dengan Insentif Sebagai Variabel Pemoderasi Pada LPD. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.23. No, 2.
- Suryono, Agus. (2017). *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press
- Syafii Inu Kencana (2018) *Manajemen Pemerintahan, Pustaka Reka Cipta*, Jawa Barat
- Syahrani (2018). Analisis Kinerja Aparatur Pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Nunukan. *Journal Administrative Reform*, 2018, 2 (3): 1624-163

Turalaki, Shinta. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Publik Terhadap Kinerja Pelayanan Di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* Vol.5 No.2

Umar, Husein (2018) *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Undang Undang nomor 1 Tahun 2004, dan Undang Undang Nomor 32 Tahun (2004) *Tentang Keuangan Negara*

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun (2003) *Tentang Keuangan Negara*

Yuwono, Teguh. (2017). *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro University

Lampiran 1 Kuisisioner

Kuisisioner ini dimaksudkan untuk penulisan karya akhir yang bersifat ilmiah sebagai persyaratan tugas akhir pada Universitas Muhammadiyah Aceh, yang difokuskan pada bidang Akuntansi

Saya memohon kesediaan saudara untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi angket ini. Saya berharap saudara menjawab dengan leluasa, sesuai dengan apa yang saudara rasakan, lakukan dan alami, bukan yang seharusnya yang ideal. Saudara diharapkan menjawab dengan jujur dan terbuka, sebab tidak ada jawaban yang benar atau salah. Sesuai dengan kode etik penelitian, saya menjamin kerahasiaan semua data. Kesediaan saudara mengisi angket ini adalah bantuan tak ternilai bagi saya. Akhirnya, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan saudara yang telah meluangkan waktu untuk mengisi angket ini, dan peneliti mohon maaf apabila ada pernyataan yang tidak berkenan di hati saudara.

A. Identitas Responden

1. Identitas Saya

1. Umur

- a. 20-25 Tahun ☐
- b. 26-31 Tahun ☐
- c. 32-37 Tahun ☐
- d. 38-43 Tahun ☐
- e. 44-50 Tahun ☐
- f. ≥ 51 Tahun ☐

2. Jenis kelamin

- a. Pria ☐
- b. Wanita ☐

3. Status Perkawinan

- a. Belum menikah ☐
- b. Menikah ☐

4. Tingkat Pendidikan

- a. SLTA ☐
- b. Diploma III ☐
- c. Sarjana (S1) ☐
- d. Pasca Sarjana (S2) ☐
- e. Doktor (S3) ☐

5. Masa Kerja

- a. < 5 Tahun ☐
- b. 6-10 Tahun ☐
- c. 11-15 Tahun ☐
- d. ≥ 16 Tahun ☐

2. Keterangan

Sangat tidak setuju	1
Tidak setuju	2
Kurang setuju	3
Setuju	4
Sangat setuju	5

A. Kinerja Anggaran (Y)

No	URAIAN	STS	TS	KS	S	SS
1	Pemanfaatan sistem komputer dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran					
2	Adanya layanan komputer mampu membuat laporan kinerja anggaran yang lebih efektif					
3	Aktivitas kinerja anggaran dapat dipenuhi oleh sistem komputer organisasi					
4	Penggunaan anggaran yang efektivitas dan produktivitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat					
5	Sistem komputer yang saya manfaatkan sangat penting dalam membantu meningkatkan kinerja anggaran					
6	Setelah menggunakan sistem komputer penggunaan kinerja anggaran menjadi lebih baik					

B. Akuntabilitas (X₁)

No	URAIAN	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya memahami tentang prosedur kerja yang diterapkan pada instansi					
2	Saya memahami tentang pembiayaan pemerintahan					
3	Saya memiliki kemampuan keuangan yang baik dalam menyampaikan hasil					
4	Saya dapat menerima berbagai pendapat dari masyarakat					
5	Adanya sarana dan prasaran dapat membantu saya dalam menyelesaikan tugas					

C. Transparansi (X₂)

No	URAIAN	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya dapat memberikan berbagai informasi keuangan yang dibutuhkan oleh aparatur					
2	Dokumen yang dipublikasi sudah sesuai dengan prosedur					
3	Saya dapat menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu					
4	Berbagai usulan dari masyarakat dapat ditanggapi dengan baik					

5	Adanya kemudahan dalam mengakses dokumen tentang anggaran membuat saya lancar membuat laporan					
6	Adanya sistem pemberian informasi dapat membantu aparatur dalam menyelesaikan tugas					

D. Partisipasi Masyarakat (X₃)

No	URAIAN	STS	TS	KS	S	SS
1	Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD.					
2	Kritik dan saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi APBD.					
3	Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD selalu melibatkan masyarakat dan Masyarakat selama ini selalu dilibatkan dalam konsultasi publik tentang pelaksanaan APBD					
4	Masyarakat memberikan motivasi dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur					

Lampiran 2 Jawaban Responden (Data Kuisisioner)

NO	Karakteristik					Indikator						Y	Indikator					X1	Indikator						X2	Indikator					X2
	IR1	IR2	IR3	IR4	IR5	A1	A2	A3	A4	A5	A6		B1	B2	B3	B4	B5		C1	C2	C3	C4	C5	C6		D1	D2	D3	D4		
1	3	1	2	3	4	5	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5	5,00	4	5	5	5	4,75	
2	4	1	2	3	4	5	4	5	5	5	5	4,83	4	5	5	4	5	4,60	5	4	5	4	4	5	4,50	4	4	4	5	4,25	
3	3	1	2	3	3	5	4	5	4	4	4	4,33	4	4	5	4	4	4,20	5	5	5	4	4	4	4,50	3	4	4	4	3,75	
4	1	1	1	3	1	4	5	5	5	4	4	4,50	3	4	4	3	4	3,60	4	4	4	4	4	2	3,67	4	4	4	2	3,50	
5	1	2	2	3	1	5	4	5	5	5	5	4,83	5	4	5	5	4	4,60	5	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00	
6	3	1	2	3	4	5	5	5	5	5	5	5,00	5	4	4	4	5	4,40	5	5	4	5	5	5	4,83	4	5	5	5	4,75	
7	2	2	2	2	2	5	4	4	4	4	4	4,17	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	
8	3	2	2	3	2	5	5	5	5	5	5	5,00	5	5	4	5	5	4,80	4	5	4	5	5	4	4,50	5	5	5	4	4,75	
9	3	1	2	2	3	5	5	5	4	4	5	4,67	4	4	4	4	3	3,80	5	4	4	4	4	4	4,17	3	4	4	4	3,75	
10	4	1	2	3	4	5	5	5	5	5	4	4,83	4	4	4	4	4	4,00	5	5	5	5	4	5	4,83	4	5	4	5	4,50	
11	2	1	2	3	2	5	5	4	5	5	4	4,67	4	3	4	4	4	3,80	4	4	4	5	4	4	4,17	4	5	4	4	4,25	
12	4	2	2	2	4	4	4	5	4	5	5	4,50	4	3	4	4	5	4,00	4	4	5	5	5	5	4,67	4	5	5	5	4,75	
13	5	2	2	3	4	4	5	4	5	5	4	4,50	5	4	5	4	5	4,60	4	5	4	4	4	4	4,17	4	4	4	4	4,00	
14	6	1	2	2	4	5	4	5	4	4	4	4,33	5	4	5	4	4	4,40	4	5	5	4	5	5	4,67	5	4	5	5	4,75	
15	3	2	2	3	3	4	4	4	4	4	3	3,83	4	4	4	3	4	3,80	4	5	4	4	4	5	4,33	4	4	4	5	4,25	
16	5	1	2	2	4	4	4	5	4	4	4	4,17	4	4	4	4	5	4,20	4	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	
17	5	2	2	3	4	5	4	4	5	4	4	4,33	4	4	5	5	5	4,60	4	4	4	4	4	4	4,00	5	4	4	4	4,25	
18	4	2	2	4	4	5	5	5	4	5	5	4,83	4	4	4	4	5	4,20	4	5	3	5	4	5	4,33	4	5	4	5	4,50	
19	4	2	2	3	4	5	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00	
20	3	1	2	3	3	5	5	5	4	5	5	4,83	5	4	5	5	4	4,60	5	4	5	5	4	5	4,67	5	5	4	5	4,75	
21	6	2	1	2	4	5	5	5	4	4	4	4,50	4	4	4	4	4	4,00	5	5	4	4	5	4	4,50	4	4	5	4	4,25	
22	4	1	2	3	4	4	4	4	4	5	5	4,33	4	4	4	3	4	3,80	5	4	4	4	5	4	4,33	5	4	5	4	4,50	
23	3	1	2	3	3	4	5	5	5	5	5	4,83	4	5	3	5	4	4,20	5	5	5	5	4	5	4,83	4	5	4	5	4,50	
24	5	2	2	3	4	4	5	5	5	5	5	4,83	4	5	3	5	4	4,20	5	5	4	5	4	5	4,67	4	5	4	5	4,50	
25	3	1	1	3	3	4	4	5	5	4	5	4,50	4	4	5	4	4	4,20	4	5	4	4	4	4	4,17	4	4	4	4	4,00	
26	3	2	1	2	2	5	4	5	5	5	5	4,83	5	4	4	4	4	4,20	5	4	5	5	4	4	4,50	4	5	4	4	4,25	
27	4	2	2	4	4	4	4	4	5	4	4	4,17	5	5	5	5	5	5,00	4	5	5	5	5	5	4,83	5	5	5	5	5,00	
28	2	2	2	3	1	5	5	5	5	5	4	4,83	5	5	4	4	4	4,40	5	5	5	5	4	4	4,67	4	5	4	4	4,25	
29	2	1	1	3	1	5	4	5	5	4	4	4,50	5	5	5	5	4	4,80	4	4	4	5	5	4	4,33	4	5	5	4	4,50	
30	5	2	2	3	4	5	4	4	4	5	5	4,50	4	4	3	3	4	3,60	4	5	4	4	4	4	4,17	4	4	4	4	4,00	
31	2	2	1	3	2	4	5	5	5	5	5	4,83	4	5	3	5	4	4,20	5	5	4	5	4	5	4,67	4	5	4	5	4,50	
32	4	2	2	3	4	4	4	4	4	5	5	4,33	4	5	5	5	5	4,80	4	5	5	4	4	5	4,50	5	4	4	5	4,50	
33	5	1	2	4	4	5	5	5	5	5	4	4,83	5	5	4	4	5	4,60	4	4	4	5	5	4	4,33	4	5	5	4	4,50	
34	3	1	2	3	3	4	5	5	4	4	4	4,33	4	4	5	5	5	4,60	4	4	3	5	4	4	4,00	4	5	4	4	4,25	
35	3	2	2	3	3	5	5	4	3	4	3	4,00	4	4	5	4	3	4,00	4	4	4	4	3	5	4,00	3	4	3	5	3,75	
36	3	1	2	2	3	5	5	4	4	4	5	4,50	3	3	4	4	4	3,60	5	5	5	5	4	5	4,83	3	5	4	5	4,25	
37	5	2	2	4	4	5	5	5	4	4	4	4,50	5	4	4	5	4	4,40	5	4	4	4	5	4	4,33	4	4	5	4	4,25	
38	2	1	1	3	2	5	4	4	4	4	4	4,17	4	4	4	4	4	4,00	5	4	4	5	4	4	4,33	5	5	4	4	4,50	
39	5	2	2	3	4	5	4	5	5	5	4	4,67	4	4	5	5	5	4,60	5	5	5	4	4	5	4,67	4	4	4	5	4,25	
40	3	1	2	2	3	5	5	5	5	5	4	4,83	4	3	4	4	4	3,80	4	4	4	5	5	4	4,33	5	5	5	4	4,75	
41	3	1	2	3	3	4	5	5	4	5	4	4,50	5	4	5	4	5	4,60	4	5	4	4	4	4	4,17	5	4	4	4	4,25	
42	4	1	2	2	4	4	5	4	5	5	4	4,50	4	5	3	4	3	3,80	3	4	4	4	3	3	3,50	4	4	3	3	3,50	
43	4	1	2	3	4	5	5	5	4	5	5	4,83	4	5	5	5	5	4,80	4	5	4	5	5	5	4,67	4	5	5	5	4,75	
44	2	1	1	3	2	4	4	5	4	5	4	4,33	4	4	4	4	4	4,00	5	4	4	4	4	5	4,33	4	4	4	5	4,25	
45	5	1	2	2	4	5	4	4	4	5	5	4,50	5	4	4	5	5	4,60	5	5	4	4	5	4	4,50	5	4	5	4	4,50	
46	3	2	2	2	3	4	4	4	4	5	4	4,17	5	4	4	5	4	4,40	5	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00	
47	4	1	2	2	4	5	4	4	4	5	5	4,50	5	4	4	5	4	4,40	5	4	5	4	5	5	4,67	5	4	5	5	4,75	
48	5	1	2	3	4	5	5	5	4	4	4	4,50	4	4	4	4	4	4,00	5	5	4	5	4	5	4,67	4	5	4	5	4,50	
49	6	2	2	4	4	5	5	5	4	5	5	4,83	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	4	5	5	4,83	4	4	5	5	4,50	
50	4	1	2	3	4	5	5	5	5	5	5	5,00	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00	
51	3	1	2																												

61	2	1	2	3	2	5	4	5	5	5	5	4,83	5	4	5	5	5	4,80	5	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00
62	4	2	2	2	4	5	5	5	4	4	4	4,50	5	5	5	4	5	4,80	4	4	4	5	5	4	4,33	4	5	5	4	4,50
63	5	2	2	3	4	4	4	4	4	5	5	4,33	5	5	5	4	5	4,80	4	5	4	5	5	5	4,67	5	5	5	5	5,00
64	6	1	2	3	4	2	2	2	2	2	2	2,00	5	5	5	5	2	4,40	4	4	5	2	2	2	3,17	2	2	2	2	2,00
65	3	2	2	2	3	5	4	3	4	4	4	4,00	5	4	4	4	4	4,20	4	4	4	4	5	4	4,17	5	4	5	4	4,50
66	5	1	2	3	4	5	5	5	5	3	3	4,33	5	5	5	5	3	4,60	5	5	5	3	3	3	4,00	3	3	3	3	3,00
67	5	2	2	3	4	4	4	4	5	4	4	4,17	5	5	5	4	4	4,60	5	5	5	4	5	5	4,83	5	4	5	5	4,75
68	4	2	2	4	4	5	5	5	4	4	4	4,50	5	5	5	5	4	4,80	4	4	5	4	4	5	4,33	4	4	4	5	4,25
69	4	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4,00	5	5	5	4	4	5	4,67	4	4	4	5	4,25
70	3	1	2	3	3	3	3	3	3	5	4	3,50	4	4	4	4	5	4,20	5	5	5	4	4	5	4,67	4	4	4	5	4,25
71	6	2	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	5	4	4	4	4,17	3	4	4	4	3,75
72	4	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4,00	3	3	4	4	4	3,60	5	5	4	4	4	5	4,50	5	4	4	5	4,50
73	3	1	2	3	3	5	5	4	3	4	4	4,17	5	4	4	5	4	4,40	5	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00
74	5	2	2	3	4	5	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	4	5	4,80	4	5	5	5	5	4	4,67	4	5	5	4	4,50

Lampiran 3 Identitas Responden

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-25 tahun	4	5,4	5,4	5,4
	26-31 tahun	9	12,2	12,2	17,6
	32-37 tahun	24	32,4	32,4	50,0
	38-43 tahun	18	24,3	24,3	74,3
	44-50 tahun	14	18,9	18,9	93,2
	> 51 tahun	5	6,8	6,8	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	41	55,4	55,4	55,4
	Wanita	33	44,6	44,6	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

Status Perkawinan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum menikah	10	13,5	13,5	13,5
	Menikah	64	86,5	86,5	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

Tingkat Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diploma III	18	24,3	24,3	24,3
	Sarjana	50	67,6	67,6	91,9
	Pasca Sarjana	6	8,1	8,1	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

Masa Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 5 tahun	6	8,1	8,1	8,1
	6-10 tahun	10	13,5	13,5	21,6
	11-15 tahun	17	23,0	23,0	44,6
	> 16 tahun	41	55,4	55,4	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

Lampiran 4 Persentase Kinerja Anggaran (Y)

A1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,4	1,4	1,4
	KS	1	1,4	1,4	2,7
	S	28	37,8	37,8	40,5
	SS	44	59,5	59,5	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

A2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,4	1,4	1,4
	KS	1	1,4	1,4	2,7
	S	34	45,9	45,9	48,6
	SS	38	51,4	51,4	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

A3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,4	1,4	1,4
	KS	2	2,7	2,7	4,1
	S	28	37,8	37,8	41,9
	SS	43	58,1	58,1	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

A4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,4	1,4	1,4
	KS	3	4,1	4,1	5,4
	S	36	48,6	48,6	54,1
	SS	34	45,9	45,9	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

A5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,4	1,4	1,4
	KS	3	4,1	4,1	5,4
	S	29	39,2	39,2	44,6
	SS	41	55,4	55,4	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

A6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,4	1,4	1,4
	KS	6	8,1	8,1	9,5
	S	39	52,7	52,7	62,2
	SS	28	37,8	37,8	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

Lampiran 5 Persentase Akuntabilitas (X1)

B1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	4	5,4	5,4	5,4
	S	36	48,6	48,6	54,1
	SS	34	45,9	45,9	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

B2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	5	6,8	6,8	6,8
	S	46	62,2	62,2	68,9
	SS	23	31,1	31,1	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

B3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	6	8,1	8,1	8,1
	S	38	51,4	51,4	59,5
	SS	30	40,5	40,5	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

B4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	5	6,8	6,8	6,8
	S	42	56,8	56,8	63,5
	SS	27	36,5	36,5	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

B5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,4	1,4	1,4
	KS	6	8,1	8,1	9,5
	S	39	52,7	52,7	62,2
	SS	28	37,8	37,8	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

Lampiran 6 Persentase Transparansi (X2)

C1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	2	2,7	2,7	2,7
	S	32	43,2	43,2	45,9
	SS	40	54,1	54,1	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

C2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	1	1,4	1,4	1,4
	S	31	41,9	41,9	43,2
	SS	42	56,8	56,8	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

C3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	2	2,7	2,7	2,7
	S	37	50,0	50,0	52,7
	SS	35	47,3	47,3	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

C4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,4	1,4	1,4
	KS	3	4,1	4,1	5,4
	S	35	47,3	47,3	52,7
	SS	35	47,3	47,3	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

C5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,4	1,4	1,4
	KS	4	5,4	5,4	6,8
	S	39	52,7	52,7	59,5
	SS	30	40,5	40,5	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

C6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2,7	2,7	2,7
	KS	3	4,1	4,1	6,8
	S	31	41,9	41,9	48,6
	SS	38	51,4	51,4	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

Lampiran 7 Persentase Partisipasi Masyarakat (X3)

D1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,4	1,4	1,4
	KS	7	9,5	9,5	10,8
	S	40	54,1	54,1	64,9
	SS	26	35,1	35,1	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

D2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,4	1,4	1,4
	KS	3	4,1	4,1	5,4
	S	35	47,3	47,3	52,7
	SS	35	47,3	47,3	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

D3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,4	1,4	1,4
	KS	4	5,4	5,4	6,8
	S	39	52,7	52,7	59,5
	SS	30	40,5	40,5	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

D4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2,7	2,7	2,7
	KS	3	4,1	4,1	6,8
	S	31	41,9	41,9	48,6
	SS	38	51,4	51,4	100,0
	Total	74	100,0	100,0	

Lampiran 8 Reliability & Validitas Kinerja Anggaran (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,801	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
A1	4,55	,600	74
A2	4,47	,602	74
A3	4,53	,624	74
A4	4,39	,637	74
A5	4,49	,646	74
A6	4,27	,668	74

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	22,15	5,306	,544	,774
A2	22,23	5,357	,521	,779
A3	22,18	4,914	,675	,743
A4	22,31	5,176	,548	,773
A5	22,22	5,185	,533	,776
A6	22,43	5,126	,528	,778

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
26,70	7,171	2,678	6

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	87,243	73	1,195	3,385	,005
Within People	4,018	5	,804		
Between Items Residual	86,649	365	,237		
Total	90,667	370	,245		
Total	177,910	443	,402		

Grand Mean = 4,45

Lampiran 9 Reliability & Validitas Akuntabilitas (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,703	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
B1	4,41	,595	74
B2	4,24	,569	74
B3	4,32	,622	74
B4	4,30	,591	74
B5	4,27	,668	74

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
B1	17,14	2,365	,478	,485
B2	17,30	2,705	,402	,576
B3	17,22	2,473	,376	,539
B4	17,24	2,406	,458	,496
B5	17,27	2,693	,407	,634

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
21,54	3,594	1,896	5

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	52,476	73	,719	1,005	,405
Within People Between Items	1,146	4	,286		
Residual	83,254	292	,285		
Total	84,400	296	,285		
Total	136,876	369	,371		

Grand Mean = 4,31

Lampiran 10 Reliability & Validitas Transparansi (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,767	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
C1	4,51	,555	74
C2	4,55	,527	74
C3	4,45	,553	74
C4	4,41	,639	74
C5	4,32	,643	74
C6	4,42	,702	74

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
C1	22,15	3,937	,328	,647
C2	22,11	3,906	,376	,633
C3	22,22	4,172	,417	,680
C4	22,26	3,509	,438	,609
C5	22,34	3,514	,430	,612
C6	22,24	3,036	,587	,544

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
26,66	4,966	2,229	6

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	60,426	73	,828		
Within People	2,471	5	,494	1,791	,114
Between Items					
Residual	100,696	365	,276		
Total	103,167	370	,279		
Total	163,592	443	,369		

Grand Mean = 4,44

Lampiran 11 Reliability & Validitas Partisipasi Masyarakat (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,769	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
D1	4,23	,673	74
D2	4,41	,639	74
D3	4,32	,643	74
D4	4,42	,702	74

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
D1	13,15	2,567	,539	,731
D2	12,97	2,629	,552	,724
D3	13,05	2,408	,682	,656
D4	12,96	2,533	,518	,744

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
17,38	4,184	2,045	4

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	76,351	73	1,046	2,335	,075
Within People Between Items	1,689	3	,563		
Residual	52,811	219	,241		
Total	54,500	222	,245		
Total	130,851	295	,444		

Grand Mean = 4,34

Lampiran 12 Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Partisipasi Masyarakat (X3), Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2) ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran (Y)

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,697 ^a	,456	,428	,36533

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat (X3), Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,162	3	1,721	12,892	,000 ^b
	Residual	9,343	70	,133		
	Total	14,505	73			

a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran (Y)

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat (X3), Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,825	,623		2,929	,005
	Akuntabilitas (X1)	,236	,107	,301	2,207	,037
	Transparansi (X2)	,241	,106	,317	2,273	,031
	Partisipasi Masyarakat (X3)	,425	,142	,487	2,992	,004

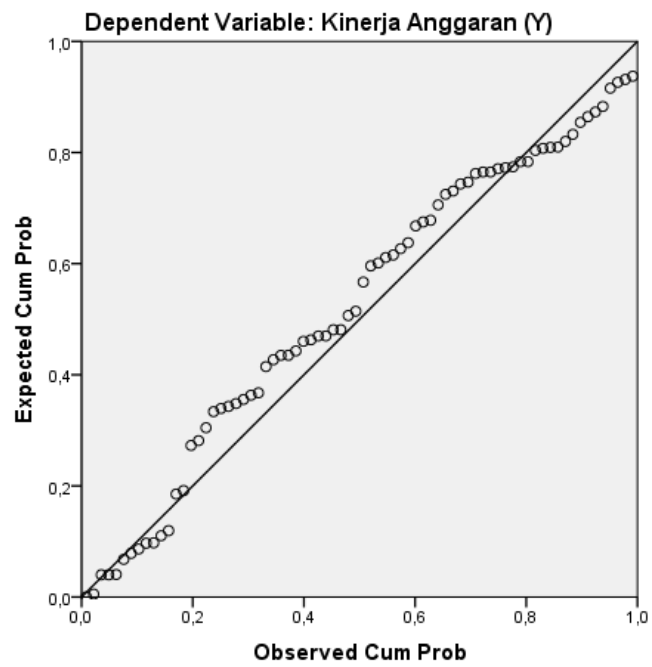
a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran (Y)

Coefficients^a

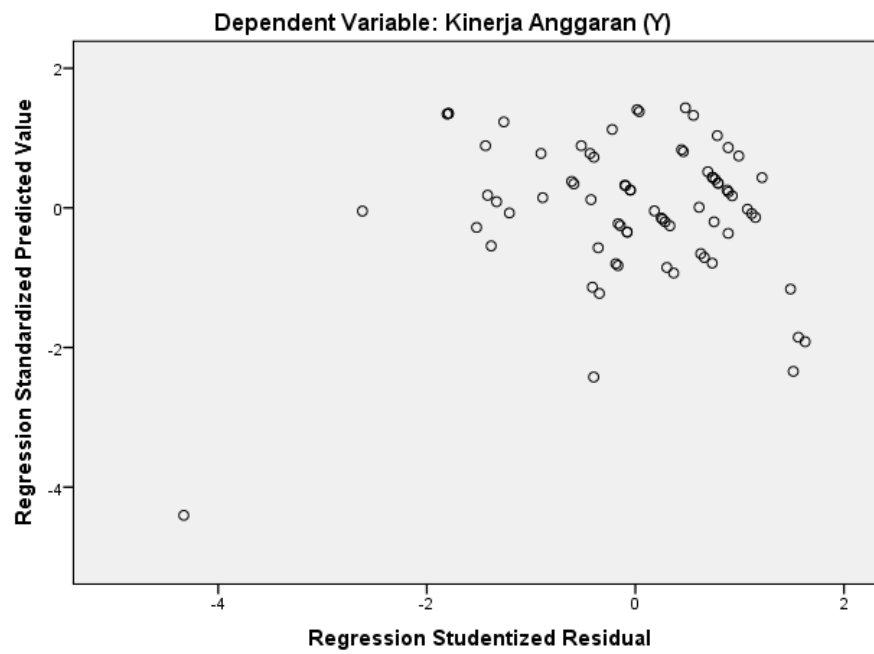
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Akuntabilitas (X1)	,880	1,136
	Transparansi (X2)	,344	2,910
	Partisipasi Masyarakat (X3)	,347	2,879

a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran (Y)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



Lampiran 13

Nilai F Tabel Pada Tingkat Keyakinan 95%

DF 2	DF 1					
	1	2	3	4	5	6
1	161,446	199,499	215,707	224,583	230,160	233,988
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296	19,329
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,688	3,581
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,810	2,699
18	4,414	3,555	3,160	2,928	2,773	2,661
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,740	2,628
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599
21	4,325	3,467	3,072	2,840	2,685	2,573
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549
23	4,279	3,422	3,028	2,796	2,640	2,528
24	4,260	3,403	3,009	2,776	2,621	2,508
25	4,242	3,385	2,991	2,759	2,603	2,490
26	4,225	3,369	2,975	2,743	2,587	2,474
27	4,210	3,354	2,960	2,728	2,572	2,459
28	4,196	3,340	2,947	2,714	2,558	2,445
29	4,183	3,328	2,934	2,701	2,545	2,432
30	4,171	3,316	2,922	2,690	2,534	2,421
31	4,160	3,305	2,911	2,679	2,523	2,409
32	4,149	3,295	2,901	2,668	2,512	2,399
33	4,139	3,285	2,892	2,659	2,503	2,389
34	4,130	3,276	2,883	2,650	2,494	2,380
35	4,121	3,267	2,874	2,641	2,485	2,372
36	4,113	3,259	2,866	2,634	2,477	2,364
37	4,105	3,252	2,859	2,626	2,470	2,356
38	4,098	3,245	2,852	2,619	2,463	2,349
39	4,091	3,238	2,845	2,612	2,456	2,342
40	4,085	3,232	2,839	2,606	2,449	2,336
41	4,079	3,226	2,833	2,600	2,443	2,330
42	4,073	3,220	2,827	2,594	2,438	2,324
43	4,067	3,214	2,822	2,589	2,432	2,319
44	4,062	3,209	2,816	2,584	2,427	2,313
45	4,057	3,204	2,812	2,579	2,422	2,308
46	4,052	3,200	2,807	2,574	2,417	2,304
47	4,047	3,195	2,802	2,570	2,413	2,299
48	4,043	3,191	2,798	2,565	2,409	2,295
49	4,038	3,187	2,794	2,561	2,404	2,290
50	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286

DF 2	DF 1					
	1	2	3	4	5	6
51	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286
52	4,030	3,179	2,786	2,553	2,397	2,283
53	4,027	3,175	2,783	2,550	2,393	2,279
54	4,023	3,172	2,779	2,546	2,389	2,275
55	4,020	3,168	2,776	2,543	2,386	2,272
56	4,016	3,165	2,773	2,540	2,383	2,269
57	4,013	3,162	2,769	2,537	2,380	2,266
58	4,010	3,159	2,766	2,534	2,377	2,263
59	4,007	3,156	2,764	2,531	2,374	2,260
60	4,004	3,153	2,761	2,528	2,371	2,257
61	4,001	3,150	2,758	2,525	2,368	2,254
62	3,998	3,148	2,755	2,523	2,366	2,251
63	3,996	3,145	2,753	2,520	2,363	2,249
64	3,993	3,143	2,751	2,518	2,361	2,246
65	3,991	3,140	2,748	2,515	2,358	2,244
66	3,989	3,138	2,746	2,513	2,356	2,242
67	3,986	3,136	2,744	2,511	2,354	2,239
68	3,984	3,134	2,742	2,509	2,352	2,237
69	3,982	3,132	2,739	2,507	2,350	2,235
70	3,980	3,130	2,737	2,505	2,348	2,233
71	3,978	3,128	2,736	2,503	2,346	2,231
72	3,976	3,126	2,734	2,501	2,344	2,229
73	3,974	3,124	2,732	2,499	2,342	2,227
74	3,972	3,122	2,730	2,497	2,340	2,226
75	3,970	3,120	2,728	2,495	2,338	2,224
76	3,968	3,119	2,727	2,494	2,337	2,222
77	3,967	3,117	2,725	2,492	2,335	2,220
78	3,965	3,115	2,723	2,490	2,333	2,219
79	3,963	3,114	2,722	2,489	2,332	2,217
80	3,962	3,112	2,720	2,487	2,330	2,216
81	3,960	3,111	2,719	2,486	2,329	2,214
82	3,959	3,109	2,717	2,484	2,327	2,213
83	3,957	3,108	2,716	2,483	2,326	2,211
84	3,956	3,107	2,715	2,482	2,324	2,210
85	3,955	3,105	2,713	2,480	2,323	2,209
86	3,953	3,104	2,712	2,479	2,322	2,207
87	3,952	3,103	2,711	2,478	2,321	2,206
88	3,951	3,101	2,709	2,476	2,319	2,205
89	3,949	3,100	2,708	2,475	2,318	2,203
90	3,948	3,099	2,707	2,474	2,317	2,202
91	3,947	3,098	2,706	2,473	2,316	2,201
92	3,945	3,095	2,704	2,471	2,313	2,199
93	3,943	3,094	2,703	2,470	2,312	2,198
94	3,942	3,093	2,701	2,469	2,311	2,197
95	3,941	3,092	2,700	2,467	2,310	2,196
96	3,940	3,091	2,699	2,466	2,309	2,195
97	3,939	3,090	2,698	2,465	2,308	2,194
98	3,938	3,089	2,697	2,465	2,307	2,193
99	3,937	3,088	2,696	2,464	2,306	2,192
100	3,936	3,087	2,696	2,463	2,305	2,191

NILAI T TABEL

DF	Tingkat Keyakinan			
	99%	97,5%	95%	90%
1	63,656	25,452	12,706	6,314
2	9,925	6,205	4,303	2,920
3	5,841	4,177	3,182	2,353
4	4,604	3,495	2,776	2,132
5	4,032	3,163	2,571	2,015
6	3,707	2,969	2,447	1,943
7	3,499	2,841	2,365	1,895
8	3,355	2,752	2,306	1,860
9	3,250	2,685	2,262	1,833
10	3,169	2,634	2,228	1,812
11	3,106	2,593	2,201	1,796
12	3,055	2,560	2,179	1,782
13	3,012	2,533	2,160	1,771
14	2,977	2,510	2,145	1,761
15	2,947	2,490	2,131	1,753
16	2,921	2,473	2,120	1,746
17	2,898	2,458	2,110	1,740
18	2,878	2,445	2,101	1,734
19	2,861	2,433	2,093	1,729
20	2,845	2,423	2,086	1,725
21	2,831	2,414	2,080	1,721
22	2,819	2,405	2,074	1,717
23	2,807	2,398	2,069	1,714
24	2,797	2,391	2,064	1,711
25	2,787	2,385	2,060	1,708
26	2,779	2,379	2,056	1,706
27	2,771	2,373	2,052	1,703
28	2,763	2,368	2,048	1,701
29	2,756	2,364	2,045	1,699
30	2,750	2,360	2,042	1,697
31	2,744	2,356	2,040	1,696
32	2,738	2,352	2,037	1,694
33	2,733	2,348	2,035	1,692
34	2,728	2,345	2,032	1,691
35	2,724	2,342	2,030	1,690
36	2,719	2,339	2,028	1,688
37	2,715	2,336	2,026	1,687
38	2,712	2,334	2,024	1,686
39	2,708	2,331	2,023	1,685
40	2,704	2,329	2,021	1,684
41	2,701	2,327	2,020	1,683
42	2,698	2,325	2,018	1,682
43	2,695	2,323	2,017	1,681
44	2,692	2,321	2,015	1,680
45	2,690	2,319	2,014	1,679
46	2,687	2,317	2,013	1,679
47	2,685	2,315	2,012	1,678
48	2,682	2,314	2,011	1,677
49	2,680	2,312	2,010	1,677
50	2,678	2,311	2,009	1,676

DF	Tingkat Keyakinan			
	99%	97,5%	95%	90%
51	2,676	2,310	2,008	1,675
52	2,674	2,308	2,007	1,675
53	2,672	2,307	2,006	1,674
54	2,670	2,306	2,005	1,674
55	2,668	2,304	2,004	1,673
56	2,667	2,303	2,003	1,673
57	2,665	2,302	2,002	1,672
58	2,663	2,301	2,002	1,672
59	2,662	2,300	2,001	1,671
60	2,660	2,299	2,000	1,671
61	2,659	2,298	2,000	1,670
62	2,657	2,297	1,999	1,670
63	2,656	2,296	1,998	1,669
64	2,655	2,295	1,998	1,669
65	2,654	2,295	1,997	1,669
66	2,652	2,294	1,997	1,668
67	2,651	2,293	1,996	1,668
68	2,650	2,292	1,995	1,668
69	2,649	2,291	1,995	1,667
70	2,648	2,291	1,994	1,667
71	2,647	2,290	1,994	1,667
72	2,646	2,289	1,993	1,666
73	2,645	2,289	1,993	1,666
74	2,644	2,288	1,993	1,666
75	2,643	2,287	1,992	1,665
76	2,642	2,287	1,992	1,665
77	2,641	2,286	1,991	1,665
78	2,640	2,285	1,991	1,665
79	2,639	2,285	1,990	1,664
80	2,639	2,284	1,990	1,664
81	2,638	2,284	1,990	1,664
82	2,637	2,283	1,989	1,664
83	2,636	2,283	1,989	1,663
84	2,636	2,282	1,989	1,663
85	2,635	2,282	1,988	1,663
86	2,634	2,281	1,988	1,663
87	2,634	2,281	1,988	1,663
88	2,633	2,280	1,987	1,662
89	2,632	2,280	1,987	1,662
90	2,632	2,280	1,987	1,662
91	2,631	2,279	1,986	1,662
92	2,630	2,279	1,986	1,662
93	2,630	2,278	1,986	1,661
94	2,629	2,278	1,986	1,661
95	2,629	2,277	1,985	1,661
96	2,628	2,277	1,985	1,661
97	2,627	2,277	1,985	1,661
98	2,627	2,276	1,984	1,661
99	2,626	2,276	1,984	1,660
100	2,626	2,276	1,984	1,660

Nilai-Nilai r Product Moment Pada Keyakinan 95%

n	Nilai r	n	Nilai r	n	Nilai r
3	0,997	27	0,381	55	0,266
4	0,950	28	0,374	60	0,254
5	0,878	29	0,367	65	0,244
6	0,811	30	0,361	70	0,235
7	0,754	31	0,355	75	0,227
8	0,707	32	0,349	80	0,220
9	0,666	33	0,344	85	0,213
10	0,632	34	0,339	90	0,207
11	0,602	35	0,334	95	0,202
12	0,576	36	0,329	100	0,194
13	0,553	37	0,325	125	0,176
14	0,532	38	0,320	150	0,159
15	0,514	39	0,316	175	0,148
16	0,497	40	0,312	200	0,138
17	0,482	41	0,308	300	0,113
18	0,468	42	0,304	400	0,098
19	0,456	43	0,301	500	0,088
20	0,444	44	0,297	600	0,080
21	0,433	45	0,294	700	0,074
22	0,423	46	0,291	800	0,070
23	0,413	47	0,288	900	0,065
24	0,404	48	0,284	1000	0,062
25	0,396	49	0,281		
26	0,388	50	0,279		

Note: n = Jumlah Sampel